



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Setiap unsur Pemerintahan sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas dan informasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan Kinerja beserta Permasalahan dan solusi dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Peraturan IKU Instansi. Selain itu, dokumen LKjIP ini sebagai bentuk komitmen DPUPR Kabupaten

Kebumen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban yang bertujuan untuk menginformasikan kinerja yang terukur dan berkesinambungan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

Kebumen, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19700728 199803 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBARvi

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Gambaran Umum1

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi2

1.3 Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama yang dihadapi.....25

1.4 Landasan Hukum.....27

1.5 Sitematika Penulisan.....28

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....30

2.1 Perencanaan Strategis.....30

2.2 Perjanjian Kinerja48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA51

3.1 Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 202552

3.2 Realisasi Anggaran Belanja83

BAB IV PENUTUP92

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja92

4.2 Permasalahan dan Kendala.....93

4.3 Rekomendasi94

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen	13
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Menurut Tingkat Golongan.....	14
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Menurut Golongan/Pangkat	14
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen	15
Tabel 1.5	Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2025	20
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026.....	34
Tabel 2.2	Target Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2022-2026.....	34
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2021-2026	35
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2024-2026	38
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dan Penataan Ruang Kab. Kebumen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Kebumen Tahun 2021-2026	39
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2025.....	49
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	51
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025	54
Tabel 3.3	Jumlah Pengaduan dan Penanganan Sengketa Pertanahan Tahun 2025 Kabupaten kebumen	55
Tabel 3.4	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2025	56
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2022 s/d 2025.....	59

Tabel 3.6 Capaian Kemajuan Sasaran Strategis DPUPR Dari Ta.2022 s/d 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen.....61

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025 dengan Target Akhir
202662

Tabel 3.8 Realisasi dan capaian kinerja Ta.2024 dan Realisasi dan capaian kinerja
Ta.202564

Tabel 3.9 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kab. Kebumen Tahun
2022-202666

Tabel 3.10 Capaian Jalan Kab. Kebumen Dalam Kondisi Mantap Tahun 2024 dan
Tahun 202567

Tabel 3.11 Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi di Kab. Kebumen 2021-202668

Tabel 3.12 Capaian Pelayanan Air Bersih Sesuai dengan Target SPM Tahun 2024
dan 202570

Tabel 3.13 Realisasi Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 dan Tahun 202571

Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2024
dan Tahun 2025.....72

Tabel 3.15 Capaian Jaringan Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik.....75

Tabel 3.16 Tabel Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 202578

Tabel 3.17 Perbandingan Kebutuhan dan Realisasi SDM pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen79

Tabel 3.18 Keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan Tahun 2025.....80

Tabel 3.19 Realisasi Keuangan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kab. Kebumen.....83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN5

Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah Tahun
2021 s/d Tahun 202565

Gambar 3.2 Capaian Jalan Kondisi Mantap di Kab. Kebumen 2021-2025.....68

Gambar 3.3 Capaian Air Bersih Tahun 2021-202573

Gambar 3.4 Capaian Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun 2021-2025.....76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Dinas Teknis yang menangani urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, diantaranya urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup pemeliharaan dan pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana air bersih, drainase, gedung, selain itu juga memberikan pelayanan persewaan alat berat, pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan urusan pertanahan yang berkaitan dengan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025, penyusunan LKjIP diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 , adapun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ini dimulai dari penjabaran rencana Strategi (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi), Sampai dengan pengukuran keberhasilan rencana tersebut dengan penilaian atas aktivitas program dan evaluasi kinerja.

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2026 meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Bina Marga;
 - b. Subkoordinator Jalan; dan
 - c. Subkoordinator Jembatan.
4. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - b. Subkoordinator Bangunan Gedung; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Air Bersih.
5. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Subkoordinator Irigasi; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Lainnya.
6. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Subkoordinator Pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah :
 - a. UPTD PBPJJ Wilayah Gombong
 - b. UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar
 - c. UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen
 - d. UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun
 - e. UPT PJI SDA Sempor
 - f. UPT PJI SDA Kedungsamak

- g. UPT PJI SDA Kaligending
- h. UPT PJI SDA Bedegolan

**BADAN USAHA MILIK DAERAH
DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI**

The organizational chart illustrates the structure of the Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) of Kabupaten Kediri, specifically the Dinas Perusaahan Umum dan Penataan Ruang. The hierarchy starts with the Bupati (Mayor) at the top, followed by the Kepala Dinas (Director of the Agency). The chart is divided into several main branches, including the Dinas Perusaahan Umum and the Dinas Penataan Ruang. Each branch further details the various departments and sub-departments, along with the names and positions of the staff members. The chart is titled 'BADAN USAHA MILIK DAERAH DINAS PERUSAHAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI'.

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen, 2025

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Uraian Tugas

I. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT (Unit Pelaksana Teknis Dinas); dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

II. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kersipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dibawah Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
- b) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- c) Subkoordinator Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan meliputi pengumpulan dan penyusunan

bahan rencana program dan anggaran, pengoordinasian dan penyusunan, pengendalian dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas

III. Bidang Bina Marga

Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembatan.
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina marga. Meliputi penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, serta menyiapkan bahan peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Subkoordinator Jalan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jalan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan.
- c) Subkoordinator Jembatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jembatan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan.

IV. Bidang Cipta Karya

Cipta karya Mempunyai tugas Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi pengelolaan air bersih bangunan gedung,dan pembinaan konstruksi, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan cipta karya;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;.
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan konstruksi;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air bersih;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan cipta karya serta pelaksanaan administrasi teknik dan pembinaan konstruksi.
- b) Subkoordinator Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan gedung. meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggaran di bidang bangunan gedung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan teknis bangunan gedung serta pelaksanaan administrasi teknik.
- c) Subkoordinator Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang air bersih meliputi perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pengelolaan air bersih,

perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.

V. Bidang Sumber Daya Air

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi irigasi, sungai, pantai, drainase, dan air baku, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sungai, pantai, dan drainase;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air baku;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan sumber daya air. Meliputi menyiapkan bahan penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan bangunan air lainnya.
- b) Subkoordinator Irigasi yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang irigasi. Meliputi menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi serta pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
- c) Subkoordinator Bangunan Air Lainnya yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan air lainnya. meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air lainnya, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

VI. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan. dengan fungsi sebagai berikut :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanahan; dan
- d) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan membawahi,

- a) Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan tata ruang. Meliputi menyiapkan bahan perumusan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.
- b) Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang meliputi menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan penyuluhan, bahan pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.
- c) Subkoordinator Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pertanahan meliputi menyiapkan perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data pertanahan, pembinaan, bimbingan, bantuan teknis pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan, pelaksanaan administrasi pertanahan, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah,

- VII. Kepala Unit Pelaksana Teknis bertugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2. Tata Kerja

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Subkoordinator, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok masing-masing, sebagai berikut :

- a) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- b) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja..
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

3. Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung Tugas Kepala Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terbagi atas 4 (empat) Bidang, 1 (Satu) Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah. Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen sampai dengan Desember 2025 berjumlah sebanyak 231 orang, terdiri dari 228 ASN dan 3 P2K dengan komposisi sebagai berikut :

a. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 53,51% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.1:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD/MI	6	2,63%
2	SLTP/MTS	12	5,26%
3	SLTA/MA	122	53,51%
4	Diploma I, II dan III	23	10,09%
5	Diploma IV/ Strata I	59	25,88%
6	Strata II	6	2,63%
Total		228	100%

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian DPUPR Kab. Kebumen, 2025

b. Menurut Golongan/Ruang :

Komposisi pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Kebumen menurut pangkat/golongan paling banyak adalah pegawai dengan golongan III atau sebesar 44,74% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Menurut Tingkat Golongan

No	Kualifikasi Golongan	Jumlah	Presentase
1	Golongan I	3	1,32%
2	Golongan II	63	27,63%
3	Golongan III	102	44,74%
4	Golongan IV	6	2,63%
5	P3K	17	7,46%
6	P3K Paruh Waktu	37	16,23%
Total		228	100%

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian DPUPR Kab.Kebumen, 2025

c. Menurut Jenjang Jabatan

Gambaran Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Menurut Golongan/Pangkat

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Presentase
1	Eselon II b (kadinas)	1	5,88%
2	Eselon III a (sekdin)	1	5,88%
3	Eselon III b (kabid)	4	23,53%
4	Eselon IV a (kasubag/ka.UPT)	7	41,18%
5	Eselon IV b (Ka.Tu di UPT)	4	23,53%
Total		17	100%

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian DPUPR Kab.Kebumen, 2025

4. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sampai dengan tahun 2025 perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Berikut ini sarana dan prasarana DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	ALAT BESAR				
1	Excavator Lainnya	7	1	0	8
2	Dump Truck	0	1	0	1
3	Asphalt Mixing Plant	0	1	0	1
4	Asphalt Finisher	0	0	1	1
5	Tandom Roller	6	0	0	6
6	Stamper	5	0	0	5
7	Track Loader + Attachment	1	0	0	1
8	Wheel Loader + Attachment	2	0	0	2
9	Loader Lainnya	1	0	0	1
10	Truck Crane	0	1	0	1
11	Mesin Proses Lainnya	16	1	0	17
12	Electric Generating Set Lainnya	9	1	1	11
13	Portable Water Pump	6	0	0	6
14	Pompa Air	1	0	0	1
15	Pompa Lainnya	19	0	0	19
16	Mesin Pemotong Aspal(Draging)	2	0	0	2
	Jumlah	75	6	2	83
	Komputer				
1	Internet	1	0	0	1
2	Komputer Jaringan Lainnya	1	0	0	1
3	P.C Unit	17	0	3	20
4	Lap Top	67	2	8	77
5	Personal Komputer Lainnya	4	0	0	4
6	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	0	0	1
7	Hard Disk	6	0	0	6
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	0	0	1
9	Monitor	1	0	0	1
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	72	4	0	76
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	0	0	4
12	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2	0	0	2
13	Peralatan Jaringan Lainnya	6	0	0	6
	Jumlah	183	6	11	200

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	Alat Keselamatan Kerja				
1	Genset	4	0	0	4
	Jumlah	4	0	0	4
	Peralatan Olah Raga				
1	Peralatan Permainan Lainnya	1	1	0	2
	Jumlah	1	1	0	2
	Alat Angkutan				
1	Station Wagon	5	3	0	8
2	Pick Up	2	5	0	7
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya (Dst)	0	3	0	3
4	Sepeda Motor	43	57	0	100
5	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Lainnya (Dst)	5	0	0	5
6	Gerobak Dorong	12	0	0	12
	Jumlah	67	68	0	135
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur				
1	Mesin Bor	4	0	0	4
2	Perkakas Bengkel Khusus Lainnya (Dst)	4	0	0	4
3	Peralatan Las Karbit	1	0	0	1
4	Tool Kit Box	1	0	0	1
5	Tool Cabinet Set	1	0	0	1
6	Gergaji	0	5	0	5
7	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya (Dst)	10	0	0	10
8	Rol Meter	5	0	0	5
9	Global Positioning System	3	0	0	3
10	Grating Generator Unit	2	1	0	3
11	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya (Dst)	3	0	0	3
12	Lemari Penyimpanan	5	0	0	5
	Jumlah	39	6	0	45
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga				
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4	0	0	4
2	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	16	0	0	16
3	Lemari Besi/Metal	25	6	0	31
4	Lemari Kayu	36	13	0	49
5	Rak Besi	44	1	0	45
6	Rak Kayu	16	5	0	21
7	Filing Cabinet Besi	46	13	0	59
8	Filing Cabinet Kayu	2	0	0	2
9	Brandkas	1	1	0	2
10	Lemari Sorok	1	0	0	1

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
11	Lemari Kaca	1	0	0	1
12	Cctv - Camera Control Television System	3	0	0	3
13	White Board	6	0	1	7
14	Copy Board/Elektric White Board	1	0	0	1
15	Peta	3	0	0	3
16	Overhead Projector	1	0	0	1
17	White Board Electronic	1	0	0	1
18	Lcd Projector/Infocus	15	0	0	15
19	Proyector Spider Bracket	2	0	0	2
20	Papan Nama Instansi	7	0	0	7
21	Alat Kantor Lainnya	7	1	0	8
22	Meja Kerja Kayu	4	0	0	4
23	Kursi Kayu	58	6	0	64
24	Sice	12	1	0	13
25	Meja Rapat	47	11	0	58
26	Tempat Tidur Kayu	1	0	0	1
27	Meja Telepon	1	0	0	1
28	Meja Resepsionis	2	0	0	2
29	Meja Tambahan	2	0	0	2
30	Meja 1/2 Biro	200	35	0	235
31	Kursi Fiber Glas/Plastik	33	0	0	33
32	Kursi Rapat	220	0	0	220
33	Kursi Tamu	15	9	0	24
34	Kursi Putar	15	18	2	35
35	Kursi Biasa	107	1	0	108
36	Bangku Tunggu	95	0	0	95
37	Kursi Lipat	39	4	1	44
38	Meja Komputer	11	6	0	17
39	Sofa	8	0	0	8
40	Meubeleur Lainnya	1	0	0	1
41	Jam Elektronik	1	0	0	1
42	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	0	0	1
43	Mesin Pemotong Rumput	14	0	0	14
44	A.C. Window	47	1	2	50
45	Kipas Angin	18	1	0	19
46	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	0	0	1
47	Alat Dapur Lainnya	1	0	0	1
48	Televisi	15	0	1	16
49	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	1	0	1
50	Amplifier	2	0	0	2
51	Equalizer	1	0	0	1
52	Loudspeaker	16	1	0	17

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
53	Sound System	3	0	0	3
54	Microphone	3	1	0	4
55	Unit Power Supply	1	0	1	2
56	Camera Video	23	0	0	23
57	Camera Film	1	0	0	1
58	Tangga Aluminium	2	1	0	3
59	Dispenser	10	0	1	11
60	Mimbar/Podium	1	0	0	1
61	Handy Cam	3	0	0	3
62	Gordyin / Kray	2	0	0	2
63	Lampu	9	0	0	9
64	Bracket Standing Peralatan	2	0	0	2
65	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	79	8	0	87
66	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	2	0	0	2
67	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	2	0	0	2
68	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	4	0	0	4
69	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0	0	1	1
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	1	0	0	1
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	5	0	0	5
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	6	0	0	6
73	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2	0	0	2
74	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	5	0	0	5
75	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	6	0	0	6
76	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13	0	0	13
	Jumlah	1411	145	10	1566
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar				
1	Audio Mixing Stationer	2	0	0	2
2	Microphone/Wireless Mic	11	0	0	11
3	Uninterruptible Power Supply (Ups)	1	0	0	1
4	Power Amplifier	5	0	0	5
5	Audio Tape Reel Recorder	1	0	0	1
6	Digital Audio Taperecorder	2	0	0	2
7	Peralatan Studio Audio Lainnya (Dst)	1	0	0	1
8	Camera Electronic	10	0	0	10
9	Rak Peralatan	2	0	0	2
10	Tripod Camera	2	0	0	2
11	Camera Digital	1	0	0	1
12	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah)	3	0	0	3
13	Pesawat Telephone	8	0	0	8
14	Handy Talky (Ht)	4	0	0	4
	Jumlah	53	0	0	53
	Alat Laboratorium				
1	Water Level Meter	0	1	0	1

No.	Jenis Barang /Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
2	Concrete Hammer Set	1	0	0	1
3	Pompa Hidrolik	1	0	0	1
4	Air Compressor (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	2	0	0	2
5	Tripod	7	0	0	7
6	Stabilizer	6	0	0	6
7	Video Printer	1	0	0	1
8	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola)	1	0	0	1
9	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	1	0	5
10	Pressure Vessel (Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia)	1	0	0	1
11	Meja Kerja	0	2	0	2
12	Fire Extinguisher	1	0	0	1
13	Layar	2	0	0	2
14	Peralatan Umum Lainnya	5	0	0	5
	Jumlah	32	4	0	36
	Jumlah Total	1.865	236	23	2.124

Sumber Data: DPUPR Kab. Kebumen,2025

5. Anggaran Keuangan

Pada Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen didukung dengan anggaran murni sebesar Rp. 118.828.122.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 45.086.805.000,00 dan Belanja Modal Rp. 73.741.317.000,00. Selanjutnya setelah perubahan APBD 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 219.364.976.583,00 sehingga ada penambahan anggaran sebesar Rp.100.536.854.583 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 55.815.718.070,00 dan Belanja Modal Rp. 163.549.258.513,00 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disajikan dalam tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen
Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.918.860.000,00	21.530.060.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.388.000,00	155.467.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.745.000,00	65.745.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.643.000,00	89.722.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.998.695.000,00	19.660.306.000,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.586.605.000,00	19.248.216.000,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	412.090.000,00	412.090.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109.928.000,00	102.039.000,00
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	109.928.000,00	102.039.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.048.000,00	270.646.000,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.100.000,00	37.315.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.780.000,00	66.780.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.409.000,00	20.674.000,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Penyediaan Bahan/Material	62.671.000,00	56.400.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	66.414.000,00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.088.000,00	13.063.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.721.000,00	211.114.000,00
1	Pengadaan Mebel	40.000.000,00	40.000.000,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.721.000,00	171.114.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.133.000,00	472.558.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	3000.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.133.000,00	170.558.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	664.947.000,00	657.930.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000,00	443.892.000,00
2	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.544.000,00	59.544.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.403.000,00	134.494.000,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.793.006.000,00	2.820.461.600,00
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.110.000,00	229.396.100,00
1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	101.030.000,00	84.986.250,00
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	53.080.000,00	144.409.850,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.638.896.000,00	2.591.065.500,00
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	13.952.485.000,00	665.253.500,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	900.000.000,00	879.755.000,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	500.000.000,00	482.902.000,00
5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	286.411.000,00	563.155.000,00
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.669.045.000,00	6.891.815.400,00
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.669.045.000,00	6.891.815.400,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase lingkungan	1.470.064.000,00	6.614.999.400,00
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Tekhnis Sistem Draenase Lingkungan	198.981.000,00	276.816.000,00
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	894.130.000,00	4.116.630.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	894.130.000,00	4.116.630.000,00
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	42.330.000,00	30.977.000,00
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000,00	100.000.000,00
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	751.800.000,00	3.985.653.000,00
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	24.405.833.000,00	13.063.618.683,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	24.405.833.000,00	13.063.618.683,00
1	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	461.254.000,00	452.258.100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
2	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	30.000.000,00	101.857.300,00
3	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23.750.000.000,00	12.352.553.000,00
4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	38.625.000,00	37.475.683,00
5	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	125.954.000,00	119.474.600,00
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	758.764.000,00	1.663.263.900,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	758.764.000,00	1.663.263.900,00
1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	258.764.000,00	1.202.362.900,00
2	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	460.901.000,000
G	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101.114.000,00	93.044.000,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.360.000,00	43.830.000,00
1	Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Jasa Konstruksi	20.360.000,00	17.010.000,00
2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	30.000.000,00	26.820.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.754.000,00	49.214.000,00
1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota	50.754.000,00	49.214.000,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	51.466.169.000,00	168.498.861.000,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	51.466.169.000,00	168.498.861.000,00
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500.000.000,00	1.539.053.000,00
2	Pembangunan Jalan	800.000.000,00	785.039.000,00
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	31.629.801.000,00	113.341.609.000,00
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	597.560.000,00	622.001.000,00
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0	28.000.000.000,00
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	199.878.000,00
7	Pembangunan Jembatan	2.210.650.000,00	2.210.650.000,00
8	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.400.000.000,00	2.750.000.000,00
9	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	549.497.000,00
10	Pemeliharaan Rutin Jalan	13.328.158.000,00	18.301.134.000,00
11	Pelebaran jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	791.201.000,00	666.392.000,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	258.398.000,00	199.239.000,00
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	258.398.000,00	199.239.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	419.373.000,00	369.992.000,00
1	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	397.373.000,00	350.042.000,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2025	Anggaran Perubahan 2025
2	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	22.000.000,00	19.950.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	86.930.000,00	77.839.000,00
1	Pelaksanaan sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	42.632.000,00	41.153.000,00
2	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	44.298.000,00	36.686.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	26.500.000,00	19.322.000,00
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	26.500.000,00	19.322.000,00
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.000.000,00	20.830.000,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	20.830.000,00
1	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	20.830.000,00
	TOTAL	118. 828.122.000,00	219. 364.976.583,00

Sumber: DPA Murni dan DPA Perubahan DPUPR Kab. Kebumen, 2025

1.3 Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama yang dihadapi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan jalan dan jembatan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Strategi peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui kebijakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang.
3. Strategi peningkatan akses air minum dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan.

4. Strategi peningkatan pembangunan drainase dilaksanakan melalui kebijakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan.
5. Strategi peningkatan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan.
6. Strategi meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, lembaga perwakilan daerah, serta kualitas administrasi perkantoran dan kapasitas keuangan daerah melalui pengembangan sumber daya aparatur, antara lain dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, dan lokakarya, serta meningkatkan efektivitas pembiayaan pengelolaan aparatur melalui koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur jalan yang baik, yang tercermin dari kondisi Jalan Kabupaten pada Tahun 2025 dengan total panjang 1.017,150 km. Berdasarkan hasil perhitungan, proporsi jalan dalam kondisi rusak mengalami peningkatan pada Triwulan IV, sehingga menyebabkan penurunan kondisi jalan dari baik menjadi sedang, dari sedang menjadi rusak ringan, dan dari rusak ringan menjadi rusak berat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh struktur tanah yang labil, curah hujan yang tinggi, kejadian bencana alam, serta tingginya tingkat penggunaan jalan yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi kendaraan (*Over Dimension Over Load*).
- b. Masih terdapat kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW dan RDTR karena kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR.
- c. Masih ditemukan daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) karena pengelolaan yang tidak baik. Wilayah Kabupaten Kebumen yang berpotensi krisis air bersih meliputi : Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Alian dan Padureso
- d. Masih ditemukan genangan akibat kurang optimalnya fungsi drainase.

- e. Belum optimalnya rehabilitasi daerah irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan serta adanya kejadian bencana yg menyebabkan kerusakan jaringan irigasi.
- f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, rendahnya kualitas administrasi perkantoran, keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, serta belum efektifnya pengelolaan dan pembiayaan aparatur yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.5 Sitematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum organisasi, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi, fungsi strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Kebumen, landasan hukum, sistematikan penulisan dan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis (RENSTRA) yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Indikator Sasaran Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditentukan, analisis dan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja, termasuk tinjauan umum capaian kinerja, permasalahan/ kendala, serta strategi peningkatan kinerja di masa datang.



PEMERINTAH KABUPATEN KULINEN
DINAS PERUBAHAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG

Jalan HRD Sudarto/Kecamatan RT Kulineran, Telp: 0271-821138

Kabupaten (2017) 82003, 1-0001 www.kabupatenkulineran.go.id

Website: www.kabupatenkulineran.go.id E-mail: info@kabupatenkulineran.go.id

LEMBAR PERNYATAAN
NO/KORP. 006.8.1-0001.0001

Yang berkepentingan dengan pernyataan ini:

Nama: Juri Wahidinda, ST MT
NIP: 19700720 198003 1 0001
Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda / IIIa
Jabatan: Kepala Dinas Perubahan Lingkungan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kulineran

Menyertakan hasil harmonisasi Laporan Hasil Evaluasi Administrasi Korp. Internal Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Perubahan Lingkungan dan Penataan Ruang Kabupaten Kulineran, dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Menyajikan dokumen perencanaan dengan memuatkan data yang dianggap perlu sebagai berikut: www.kabupatenkulineran.go.id, sebagai data yang akurat, sehingga bermanfaat untuk mewujudkan rencana yang akan dicapai sesuai dengan dan berkolaborasi dengan,
2. Terus meningkatkan kualitas hasil pengujian rencana sehingga dapat mewujudkan rencana secara lebih optimal, efektif dan efisien,
3. Memantapkan informasi data yang akurat untuk sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kerjanya sehingga dapat meningkatkan budaya kerja yang positif,
4. Melakukan peningkatan pelaksanaan evaluasi internal dengan meningkatkan kegiatan sebagai kegiatan dan monitoring terintegrasi sebagai kegiatan implementasi LAKIP

Diketahui dan Persetujuan di atas saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab

Klaten, 14 Oktober 2022
Kepala Dinas Perubahan Lingkungan dan
Penataan Ruang Kabupaten Kulineran



Juri Wahidinda, ST MT
Pembina Utama Muda / IIIa
NIP. 19700720 198003 1 0001

NO	TEMA/AN	REKOMENDASI	INDUK KALIT	KETERANGAN
1	Penerapan Skema: a. Dokumen Identifikasi Skema yang dipublikasikan/tersedia di dalam sistem sumber telah sesuai dan layak untuk b. Naskah Penerapan Skema dalam naskahnya memenuhi standar yang ada, yaitu untuk mencapai hasil dengan akurat sesuai yang diarahkan menggunakan pengelompokan, penempatan, dan format yang sesuai dengan standar yang berlaku. c. Naskah Penerapan Skema dalam naskahnya memenuhi standar yang ada, yaitu untuk mencapai hasil dengan akurat sesuai yang diarahkan menggunakan pengelompokan, penempatan, dan format yang sesuai dengan standar yang berlaku.	1. melakukan review dan perbaikan atas penerapan Skema dan melakukan identifikasi atas kekurangan/pemenuhan Skema yang dimiliki oleh naskah, adanya potensi kesalahan Skema dengan logika dan fungsi dari perangkat lunak yang dimiliki oleh naskah dalam mencapai hasil 2. Melakukan identifikasi/penyempurnaan Skema Skema yang digunakan dalam naskah	Penggunaan Skema DPA/DPD Menyajikan dokumen dengan format yang sesuai yang dapat dipahami dan digunakan	Skema Penggunaan Skema

	1. Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan hasil dan keberlanjutan			
2	Pengukuran kinerja a. Pengukuran kinerja belum dilakukan dan terdapat mekanisme yang jelas/terstruktur pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan b. Tingkat kapabilitas dan akurasi data tidak memenuhi persyaratan untuk menilai perlu dipertimbangkan antara lain pada tingkat 1 data duplikat dalam waktu sangat lama, berupa laporan kinerja tahun 2020 sebagai bahan acuan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dan belum sepenuhnya menjadi seluruh data yang diperlukan karena belum final dan final c. Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai informasi (APLIKASI) secara optimal	Meningkatkan kualitas hasil pengukuran kinerja dengan memastikan data yang diinput lebih akurat dan benar https://www.kemendagri.go.id/ adalah data yang belum sehingga proses pengukuran kinerja penggabungan melalui kinerja yang terintegrasi dan melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas informasi aplikasi	Pengukuran kinerja DPLPP Teras meningkatkan kualitas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara lebih optimal, efektif dan efisien. Dan data terus meningkatkan kualitas hasil pengukuran kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara lebih optimal, efektif dan efisien	Dalam Penyusunan Laporan

3.	Pemilihan Kinerja Laporan Kinerja Tahun 2023 (LKJPT) tahun sebelumnya sesuai standar yang menggambarkan kualitas dan pencapaian kinerja, namun menghindari pertentangan dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme (Integrity), dan tidak menghindari efisiensi atau penghematan untuk biaya dalam mencapai kinerja	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian dan tantangan kinerja di level nasional/propinsi/daerah/kabupaten serta analisis efektivitas dan penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja	Pemilihan Kapas CPMK akan memantapkan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan evaluasi laporan kinerja berikutnya sehingga dapat dipakai untuk meningkatkan kinerja setiap organisasi	Salah Pernyataan Terlepas
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal CPMK tahun sebelumnya di tingkat kabupaten atau kota sebagai acuan untuk evaluasi kinerja internal tahun 2023 sehingga tahun berikutnya dapat meningkatkan implementasi SAP dan dapat memberikan peran yang nyata dalam meningkatkan kualitas dan kinerja	Mendukung di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas internal sehingga dapat meningkatkan implementasi SAP dan dapat memberikan dampak dalam efisiensi dan kinerja kinerja	Pemilihan Kapas CPMK akan melakukan peningkatan pelaksanaan evaluasi internal dengan memberikan rekomendasi, dukungan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan monitoring terhadap seluruh komponen implementasi SAP	Salah Pernyataan Terlepas



14 October 2023
Kepala Dinas dan
Korwil Kabupaten

Penyidik, ST, MT
Purnama Maria Mulya - PNP
NIP. 19704029 198003 1 004

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memberikan pelayanan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan air bersih, drainase, pembangunan gedung pemerintah, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan embung. Pelaksanaan pelayanan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut. Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan, yaitu :

- a. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD, namun tidak berhubungan langsung dengan sasaran dan tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.
- b. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- c. Ketiga, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Wajib Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan menjadi pedoman dan

penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA,
MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT ”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sejahtera

Terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada disekitarnya sehingga mampu untuk mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang

berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

3. Sejahtera

Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

4. Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religious dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Akronim dari Visi Bupati Kebumen adalah :

“KEBUMEN SEMARAK”

Dalam upaya pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah.

Dalam perumusan misi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) dan Misi IV RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 .

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan E-Gov dan Open -Gov terintegrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

Tabel 2.2
Target Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84	85	85,5	86
2	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69

Sumber : RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, sesuai dengan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung pada misi keempat yaitu *“Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”*.

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Uraian mengenai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, terutama sebagai OPD yang berkontribusi untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran selama periode Renstra.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Kebumen Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	1. Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi 2. Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur 3. Pelayanan publik yang prima
MISI IV : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Pembangunan sistem jaringan prasarana jalan di antaranya berupa: a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar – Tambak

			Mulyo – Jladri – Ayah – Bodo c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan) d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong e. Penyediaan jalan menuju kawasan industri 3. Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa: a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Keburejo 4. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen a. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari b. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari
--	--	--	--

Sumber: RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026 (diolah)

Untuk mencapai misi tersebut di atas maka perlu ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran kebijakan, dalam 5 (lima) tahun mendatang, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap pencernaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah Sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode

RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021.

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen. indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan 1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	85,50	85,50
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pertanahan)							
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Tujuan 2							
	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)							
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	65,89

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Dan Penataan Ruang Kab. Kebumen yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kab.Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Cap. 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	(%)
1.	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80	80	77,8	80	82,5	85	87,5	87,5
2.	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	17,54	18,75	20	21,25	22,5	23,75	25	25
3.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	15,98	15,98	15,98	17,04	18,01	19,98	20,04	20,04
4.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,13	80,13	81,14	81,14	82,15	83,16	83,84	83,84
5	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertangani	13,04	13,04	13,91	13,91	15,00	15,00	15,00	15,00
6	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
7	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	44,92	44,92	44,92	50,15	55,08	60	64,92	64,92
8	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	75,00	75,00	91,15	91,25	91,35	91,45	91,55	91,55

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran strategi organisasi yaitu melalui program dan kegiatan. Dalam mendukung pencapaian Target Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten tahun 2025, DPUPR melaksanakan 2 Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 9 (Sembilan) Program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan serta Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan, rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 tercermin dalam pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Mebel

- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Mebel
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Bidang Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2025 telah menyusun dokumen perencanaan teknis bidang bina marga sejumlah 22 paket dokumen tentang penyelenggaraan jalan dan jembatan
 - b) Pemeliharaan Berkala Jalan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala yaitu : Pemeliharaan Berkala Jalan Banyumudal-Rediasari, Pemeliharaan Berkala Jalan Bumiagung-Demangsari, Pemeliharaan Berkala Jalan Gunungsari-Selogiri, Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroto-Banyumudal, Pemeliharaan Berkala Jalan Kembaran-Kedungbener, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal-Pujitirto, Pemeliharaan Berkala Jalan Kreteg-Giyanti, Pemeliharaan Berkala Jalan Sidodadi-Kamulyan, Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari-Jatisari, Pemeliharaan Berkala Jalan Bonorowo-Pujodadi, Pemeliharaan Berkala Jalan Demangsari-Jatijajar, Pemeliharaan Berkala Jalan Dorowati-Podourip, Pemeliharaan Berkala Jalan Giritirto-Plipitan, Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikudu-Plumbon, Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliputih-Jatipurus, Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggayam-Kebakalan, Pemeliharaan Berkala Jalan Karangsambung-Giritirto, Pemeliharaan Berkala Jalan

Kebulusan-Sidomulyo, Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungbajul-Poncowarno, Pemeliharaan Berkala Jalan Kenteng-Kerileng, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal- Wadasmalang, Pemeliharaan Berkala Jalan Langse-Pujegan, Pemeliharaan Berkala Jalan Lerep-Karangtengah, Pemeliharaan Berkala Jalan Meles-Banjareja, Pemeliharaan Berkala Jalan Pandansari-Watuwalang, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwogondo-Buayan, Pemeliharaan Berkala Jalan Sadangwetan-Kedunggong, Pemeliharaan Berkala Jalan Sidayu-Lawangawu, Pemeliharaan Berkala Jalan Selokerto-Buayan, Pemeliharaan Berkala Jalan Semali-Kedungwringin, Pemeliharaan Berkala Jalan Giwangretno-Adikarto, Pemeliharaan Berkala Jalan Kebekelan-Lembupurwo, Pemeliharaan Berkala Jalan Jatisari-Bocor, Pemeliharaan Berkala Jalan Krakal-Kaligending, Pemeliharaan Berkala Jalan Adikarso-Sangubanyu, Pemeliharaan Berkala Jalan Kambalan-Ambal, Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari-Kembaran, Pemeliharaan Berkala Jalan Sidomulyo-Patemon, Pemeliharaan Berkala Jalan Kewedusan-Sruni, Pemeliharaan Berkala Jalan Petanahan-Puring, Pemeliharaan Berkala Jalan Potongan Gombang, Pemeliharaan Berkala Jalan Kemujan-Adikarto, Pemeliharaan Berkala Jalan Podourip-Sugihwaras, Pemeliharaan Berkala Jalan Banjareja-Rogodono, Pemeliharaan Berkala Jalan Dorowati-Kedungwinangun, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari-Tambaharjo, Pemeliharaan Berkala Jalan Mangli-Karangsari, Pemeliharaan Berkala Jalan Munggu-Tambakmulyo, Pemeliharaan Berkala Jalan Rogodadi-Watukelir, Pemeliharaan Berkala Jalan Lerep-Karangtengah, Pemeliharaan Berkala Jalan Kuwarasan-Puring, Pemeliharaan Berkala Jalan Kawasan Peruntukan Industri Gombang, Pemeliharaan Berkala Jalan Wero-Semondo, Pemeliharaan Berkala Jalan Selokerto-Jatinegara

- c) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa, pada tahun 2025 telah dilaksanakan belanja suku cadang alat besar
- d) Pelebaran Jalan Menuju Standar, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Pelebaran Jalan Gentan-Miritpetikusuman (Banprov), Pelebaran Jalan Kembaran-Kedungbener (Banprov), Pelebaran Jalan Kawedusan- Sruni (Banprov), Pelebaran Jalan Kalibangkang-Argosari (Banprov), Pelebaran Jalan Rogodono-Gondosuli (Banprov)

- e) Pemeliharaan Rutin Jembatan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jembatan Asahan pada Ruas Jalan Karanggayam-Kebakalan
- f) Pembangunan Jembatan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembangunan jembatan Desa Kedungjati Kecamatan Sempor Tahap II
- g) Pemeliharaan berkala Jembatan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan berkala jembatan pada Ruas Jalan Karanggayam-Kebakalan, Pemeliharaan Berkala Jembatan pada Ruas Jalan Kutowinangun-Poncowarno, Pemeliharaan Berkala Jembatan Pesuruhan pada Ruas Jalan Sidayu-Lawangawu, Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangmalang 2 pada Ruas Jalan Rogodono-Pringtutul, Pemeliharaan Berkala Jembatan Plunjaran pada Ruas Jalan Karanggayam-Kebakalan, Pemeliharaan Berkala Jembatan Kaligending pada Ruas Jalan Lingkar Selatan Karangsambung, Pemeliharaan Berkala Box Culvert pada Ruas Jalan Pandansari-Watuwalang, Pemeliharaan Berkala Box Culvert pada Ruas Jalan Wadasmalang-Slepi
- h) Survey Kondisi Jalan/Jembatan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan
- i) Pemeliharaan Rutin Jalan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan jembatan kabupaten di 4 (empat) UPT dan penanganan lainnya
- j) Pelebaran Jembatan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Pelebaran Jembatan pada Ruas Jalan Peniron-Karanggayam

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas KPSPAM sebanyak 184 orang
 - b) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Pembangunan SPAM sebanyak 10 lokasi diantaranya Pembangunan SPAM Desa Kalijering Kecamatan Padureso (DAU), Pembangunan SPAM Desa Kemangguan Kecamatan Alian (DAU),

Pembangunan SPAM Desa Jatijajar Kecamatan Ayah (DAU), Pembangunan SPAM Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam (DAU), Pembangunan SPAM Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun (DAU), Pembangunan SPAM Desa Kenteng Kecamatan Sempor (DAU), Pembangunan SPAM Desa Langse Kecamatan Karangsambung (DAU), Pembangunan SPAM Desa Soka Kecamatan Poncowarno (DAU), Pembangunan SPAM Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor (DAU), Pembangunan SPAM Desa Pecarikan Kecamatan Prembun (DAU)

- c) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Peningkatan SPAM di Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan (DAU)

3. Program Penataan Bangunan Gedung

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a) Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 sebanyak 3 (tiga paket) pemeliharaan dan perawatan Gedung
 - b) Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 telah dilaksanakan konsultasi bantuan teknis PBG dan SLF
 - c) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung yaitu :Pembangunan Gedung di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Kebumen, Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan DPUPR Kabupaten Kebumen, Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pendopo Kabumian Tahap 3, Pembangunan Mushala KPU Kabupaten Kebumen, Pembangunan Rumah Jabatan Pengadilan Negeri Kebumen dan Pos Satpam dan Pemeliharaan Gedung Kecamatan Karanggayam, Pemeliharaan Gedung Kecamatan Kebumen, Pembangunan Gedung Kecamatan Mirit, Pembangunan Gedung Kecamatan Rowokele
 - d) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi dengan total peserta 140 peserta

- e) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG, pada tahun 2025 jumlah penerbitan PBG sebanyak 188 dokumen dan SLF sebanyak 117.

4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melaksanakan penerimaan hibah Pcs. Semen sebanyak 12.380 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh) ke beberapa lokasi di perdesaan
 - b) Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 ada 10 (sepuluh) paket perencanaan.

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a) Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa Konstruksi, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi dengan total sebanyak 50 peserta
 - b) Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, pada tahun 2025, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi dengan total sebanyak 30 peserta
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 telah dilaksanakan belanja jasa studi penelitian dan studi bantuan teknik

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan Embung Pandansari yang berlokasi di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
- b) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya, pada tahun 2025 telah disusun 2 (dua) paket perencanaan
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi pada D.I Kebakalan 1 Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam
 - b) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kebumen yaitu : Pemeliharaan D.I Krumput, Pemeliharaan Irigasi D.I Purwosari, Pemeliharaan Irigasi D.I Krandegan, Pemeliharaan Irigasi D.I Kaliketek, Pemeliharaan Sayap Bendung Kaliketek, Pemeliharaan Saluran D.I Jlegong, Pemeliharaan Saluran D.I Plikon, Pemeliharaan Saluran D.I Rembang, Pemeliharaan Saluran D.I Semampir (normalisasi), Pemeliharaan Bendung D.I Donorejo, Pemeliharaan Bron D.I Karangpucung, Pemeliharaan Saluran D.I Pangempon, Pemeliharaan Saluran D.I Bango, Pemeliharaan Saluran D.I Tratas, Pemeliharaan Bendung Siragas D.I Pringtutul (normalisasi)
 - c) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi, pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan P3A/GP3A dengan total peserta sebanyak 110 orang dan telah dilaksanakan Sidang Komisi Irigasi 1 dengan total peserta 90 orang dan Sidang Komisi Irigasi 2 dengan total peserta 100 orang.
 - d) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, pada tahun 2025 telah disusun 9 (sembilan) paket dokumen perencanaan

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan Pemeliharaan Drainase yaitu : Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Bumiagung-Wagirpandan, Pemeliharaan Drainase Gentan, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Adimulyo-Banyurata,

Pemeliharaan Drainase Jalan Sarbini, Pemeliharaan Drainase Kol. Sugiono, Pemeliharaan Drainase Pogog, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Karanganyar-Karanggayam, Pemeliharaan Drainase Krembeng, Pemeliharaan Drainase K.H Hasim Ashari (normalisasi), Pemeliharaan Drainase Bedogol (normalisasi), Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Karangsambung-Sadang, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Tentara Pelajar Cs, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Kabekelan-Lembupurwo, Pemeliharaan Drainase Gading, Pemeliharaan Drainase Sidoagung, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Gentan-Mirit, Pemeliharaan Drainase Jatibungkus (normalisasi), Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Cincin Kota, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Kewayuhan-Logede, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Poncowarno-Karangtengah, Pemeliharaan Drainase Wiragati, Pemeliharaan Drainase Tambaharjo, Pemeliharaan Drainase Sikebo, Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Karanganyar-Kemuja, Pemeliharaan Drainase Kating (normalisasi), Pemeliharaan Drainase Bantar Desa Jtiroto, Pemeliharaan Drainase Serut, Pemeliharaan Drainase Suta, Pemeliharaan Drainase Desa Sidoharjo, Pemeliharaan Drainase Jalan Pahlawan, Pemeliharaan Silangsur, Pemeliharaan Drainase Alun-Alun Kebumen dan Pemeliharaan Drainase pada Jalan Soekarno Hatta dan Jl Sugiono Kebumen

- b) Penyusunan Rencana kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan, pada tahun 2025 telah disusun 5 (lima) paket dokumen perencanaan

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi Penetapan RDTR Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 telah disusun dokumen asistensi RDTR Perkotaan Kebumen dan RDTR Perkotaan Prembun
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 telah disusun Ranperkada RDTR Gombong-Karanganyar
 - b) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, pada tahun 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi peningkatan peran serta masyarakat

dalam penataan ruang sebanyak 1 (satu) kali dengan total peserta sebanyak 60 orang

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, pada tahun 2025 telah disusun dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebanyak 1 (satu) dokumen.
 - b) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang, pada tahun 2025 telah dilakukan pemutakhiran *website* tata ruang Kabupaten Kebumen (<https://tataruang.kebumenkab.go.id>)
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota.
 - a) Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Rapat Forum Penataan Ruang sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah peserta 1 (satu) kali rapat 10 orang dan pada tahun 2025 jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan sebanyak 335 dokumen.

9. Program penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a)** Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 jumlah kasus penyelesaian penanganan sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen sebanyak 20 kasus.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan sasaran program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Kebumen Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 Indeks	90,91 Indeks				
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100
2	Tujuan :							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89 Indeks	66,89 Indeks				66,89
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67 Indeks	63,67 Indeks				63,67

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Kab.Kebumen, 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp. 118.828.122.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 45.086.805.000,00 dan Belanja Modal Rp. 73.741.317.000,00. Selanjutnya setelah perubahan APBD 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 219.364.976.583,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 55.815.718.070,00 dan Belanja Modal Rp. 163.549.258.513,00.

Tabel 2.7
Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.22.918.860.000,-	Rp.21.530.060.000,-
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.15.793.006.000,-	Rp.2.820.461.600,-
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 894.130.000,-	Rp.4.116.630.000,-
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.1.669.045.000,-	Rp.6.891.815.400,-
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.24.405.833.000,-	Rp.13.063.618.683,-
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp.758.764.000,-	Rp.1.663.263.900,-
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 51.466.169.000,-	Rp.168.498.861.000,-
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.101.114.000,-	Rp.93.044.000,-
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.791.201.000,-	Rp.666.392.000,-
10.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 30.000.000,-	Rp.20.830.000,-
TOTAL		Rp.118.828.122.000,-	Rp.219.364.976.583,-

Sumber: DPA Murni dan Perubahan DPUPR Kab. Kebumen, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, serta akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025. Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut: Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase (%) capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang

4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 55\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Bahwa proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan reviu internal pada tanggal 28 Januari 2026 dan diikuti oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Ketua Tim Kerja Dinas PUPR Kabupaten Kebumen.



Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2026

Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada :

https://drive.google.com/drive/folders/1pVrAhaTGo865qEjzCMBD_4azN2rwDs.

3.1 Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan program dan kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator

sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi: input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil).

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke-I (satu) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi dan Misi Ke-IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang kemudian tujuan ini dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan
- b. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

a) Realisasi Capaian DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan perjanjian kinerja tahun kelima periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja terdapat 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rea	Tingkat Capaian	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan public					
1.	Tertanganinya kasus sengketa lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Tujuan : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah					
1.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89	Realisasi dicukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67%	Sangat Tinggi

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen Tahun, 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap sasaran strategis pada Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Pada tujuan ke-1 yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik, sasaran tertanganinya kasus sengketa lahan, yang diukur melalui indikator Persentase Penanganan Sengketa Lahan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja 100 persen dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut juga didukung oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, menunjukkan kasus sengketa lahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi secara efektif dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan optimalnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses

pelayanan dan penanganan sengketa lahan yang dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Kebumen. Adapun jumlah pengaduan dan penanganan sengketa pertanahan tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Pengaduan dan Penanganan Sengketa Pertanahan Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Penguasaan dan pemilikan	6 Kasus
2	Pemeliharaan data pendaftaran tanah	7 Kasus
3	Tanah adat/tanah ulayat	4 Kasus
4	Letak dan batas bidang tanah	3 Kasus
Jumlah Total		20 Kasus
Persentase		100%

Sumber : BPN, Kab.Kebumen,2025

Selanjutnya, pada tujuan ke-2 yakni, meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, capaian indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dicukupi dari data yang bersumber dari DPUPR dan DISPERKIMHUB, sehingga pengukuran kinerja dilakukan secara kompilatif lintas perangkat daerah. Sementara itu, sasaran ke-2 yakni, meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi dengan target 63,67 dengan realisasi sebesar 59,64 sehingga presentase capaian nya mencapai 93,67 persen mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas infrastruktur daerah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Melihat 2 sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara rata-rata adalah sangat tinggi, maka hal ini menunjukan efektivitas dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

b) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan di dukung melalui 10 (sepuluh) program unggulan yang meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	93,75	93,75	Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dihapus pada saat penganggaran
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	85	78,85	92,76	Pada TA 2025, DAK Bidang Irigasi tidak dialokasikan/tidak turun, sehingga kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi yang sebelumnya direncanakan melalui sumber dana tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	23,75	25,79	108,59	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	19,98	16,43	82,23	Adanya efisiensi anggaran sehingga realisasi tidak dapat dicukupi sesuai target. Untuk itu pekerjaan diprioritaskan dilokasi yang baru saja terjadi permasalahan/ kerusakan sesuai dengan urgensitas kebutuhan penanganan.
S	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	83,84	85,52	102,00	
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,	Persentase Pekerjaan Bangunan yg Tertangani	%	15	15	100	
7	Program Penyelenggaraan Jalan,	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	85,18	74,27	87,19	Penurunan kondisi jalan dari sedang menjadi rusak ringan atau rusak berat yang diakibatkan dari beberapa faktor seperti peningkatan volume lalu lintas, cuaca, drainase dan umur perkerasan sehingga target kemantapan jalan tidak naik signifikan
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi,	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah dibina dan Nilainya Baik	%	64,92	64,92	100	

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Ket.
				Tar	Real.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,45	91,45	100	
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	Persentase Penanganan sengketa Lahan	%	100	100	100	

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Berdasarkan tabel diatas, secara umum, capaian kinerja program termasuk kategori sangat tinggi, dengan sebagian besar program mencapai atau melampaui target. Dari 10 program, 6 program mencapai 100% atau lebih, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program pada Tahun Anggaran 2025. Program yang capaian kinerjanya mencapai dan melampaui target antara lain Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia, serta fokus pada kegiatan prioritas. Sementara itu, beberapa program menunjukkan capaian belum optimal, antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, serta Program Penyelenggaraan Jalan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan dan efisiensi anggaran, termasuk tidak dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi pada Tahun Anggaran 2025, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Selain itu, faktor teknis seperti peningkatan volume lalu lintas, kondisi cuaca, sistem drainase, serta umur perkerasan jalan turut mempengaruhi capaian indikator kinerja. Secara keseluruhan, capaian

kinerja program telah mencerminkan upaya perangkat daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan akuntabel. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan prioritas pada kegiatan strategis, serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif guna mendukung peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

c) Perbandingan Kinerja Tahun 2022 s/d 2025

Capaian kinerja terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 s/d 2025 secara umum mencapai 100%. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terdapat 2 (dua) indikator berupa indeks kepuasan masyarakat, indeks kualitas Infrastruktur Daerah dan indeks infrastruktur pekerjaan umum. Untuk selanjutnya realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran dan realisasi kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 s/d 2025 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Kebumen Tahun 2022 s/d 2025

Tahun 2022				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81	56,07	104,39% Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35	57,89	100,9%

Tahun 2023				
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	59,27	57,93	97,74% Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16	58,94	99,63%

Tahun 2024				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	63,10	68.65	108,79% Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48	59,00	95,96%

Tahun 2025				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB	
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67%

Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Tabel 3.6
Capaian Kemajuan Sasaran Strategis DPUPR Dari Ta.2022 s/d 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100	100
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	56,07	57,93	68,65	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,89	58,94	59,00	59,64

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Berdasarkan keterkaitan Tabel 3.5 Capaian Kinerja dan Tabel 3.6 Capaian Kemajuan Sasaran Strategis, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama Tahun 2022–2025 menunjukkan capaian yang konsisten dan progresif. Penanganan sengketa lahan berhasil dipertahankan pada tingkat 100% setiap tahun, mencerminkan efektivitas penyelesaian permasalahan pertanahan. Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan signifikan, ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah hingga Tahun 2024, sementara realisasi Tahun 2025 masih dalam proses pengukuran kinerja karena dilakukan secara kompilatif lintas perangkat daerah. Selanjutnya, Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum menunjukkan tren peningkatan bertahap dari Tahun 2022 hingga 2025, yang menegaskan adanya perbaikan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan keberhasilan DPUPR Kabupaten Kebumen dalam mendorong kemajuan sasaran strategis, dengan tetap memerlukan penguatan pada aspek kualitas hasil pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ke depan.

d). Perbandingan Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025 dengan 2026 (Target Akhir Rencana Strategis)

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025 dengan Target Akhir 2026

Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Presentase Penanganan sengketa Lahan	100	100	100%
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,64	65,89	90,51%

Sumber : DPUPR Kab Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, tahun 2025 merupakan tahun ke-5 implementasi rencana strategis, adapun indikator capaian kinerja yang pertama

adalah presentase penanganan sengketa lahan pada tahun 2025 sebesar 100 persen, sesuai dengan target akhir periode rencana strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan sengketa lahan telah berjalan efektif dan mampu memenuhi target yang direncanakan. Selanjutnya pada indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum menunjukkan capaian sebesar 59,64 dari target akhir 65,89, dengan tingkat capaian mencapai 90,51 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja berada pada kategori tinggi, namun masih terdapat selisih capaian yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien agar target akhir tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

e). Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Sesuai dengan Sasaran Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu, Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur Pekerjaan umum dengan menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu:

(Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik + Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan + Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap/3)

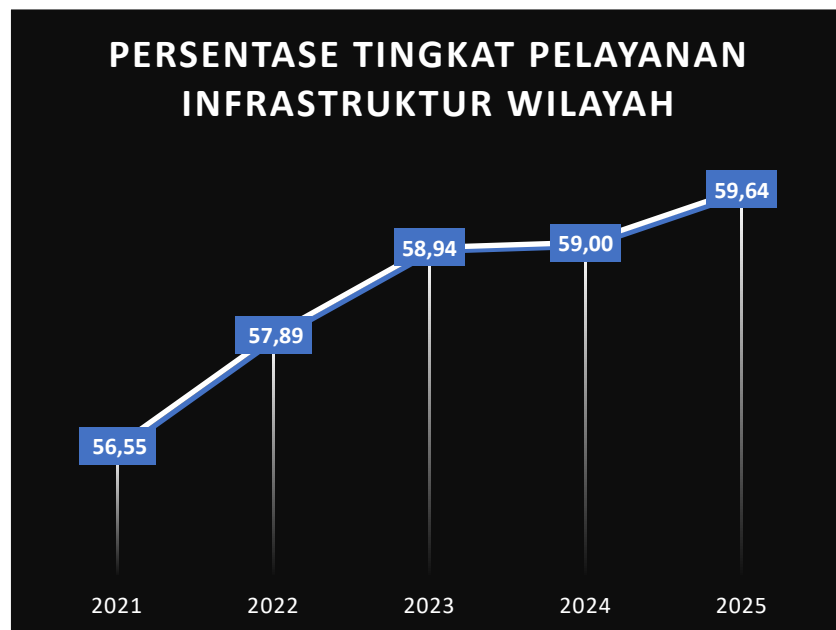
Tabel 3.8
Realisasi dan capaian kinerja Ta.2024 dan Realisasi dan capaian
kinerja Ta.2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Real 2024	Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	61,48	59,00	95,96 %	Sesuai rumus perhitungan realisasi	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Real 2025	Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67 %	Sesuai rumus perhitungan realisasi	

Sumber : DPUPR Kab Kebumen,2025

Gambar 3.1
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2025



Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas, realisasi capaian kinerja DPUPR terkait sasaran strategis yakni meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang diukur melalui indeks infrastruktur pekerjaan umum masuk dalam kategori baik karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh 3 (tiga) Indikator Program, sebagai berikut :

1. Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah 1017,150 kilometer. Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 122,730 Km atau sebesar 12,07 % yang lokasinya tersebar di 22 wilayah yaitu kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Kuwarasan, Petanahan, Puring, Adimulyo, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, Alian, Pejagoan, Petanahan, Sruweng, Klirong, Poncowarno, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Mirit, Bonorowo dan Kebumen. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kab. Kebumen Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Kondisi awal	Panjang Jalan (km)	Panjang Jalan (km)	Panjang Jalan (km)
		2022	2023	2024	2025
1	Kondisi Baik	292,179	450,569	411,814	470,960
2	Kondisi Sedang	416,841	271,269	335,543	284,430
3	Kondisi Rusak Ringan	162,026	157,790	166,827	139,030
4	Kondisi Rusak Berat	89,312	137,522	102,966	122,730
5	Jalan secara keseluruhan	960,358	960,358	1017,150	1017,150
Proporsi Kondisi Baik (%)		30,424	44,30	40,49	46,30
Proporsi Kondisi Sedang (%)		43,405	26,67	32,99	27,96
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		16,871	15,51	16,40	13,67
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		9,30	13,52	10,12	12,07

Sumber: Data Jalan DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Pada tahun 2025 sesuai SK Jalan total panjang jalan kabupaten adalah 1.017,150, adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2025 adalah sepanjang 755,390 kilometer atau sebesar 74,27 persen. Dimana Kondisi ini mengalami peningkatan status jalan dari kondisi sedang ke kondisi baik, yaitu sebesar 18,34 persen, atau 186.530 kilometer. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jalan kondisi mantap pada tahun 2024 sebesar 73,48 persen atau sepanjang 747.357 kilometer.

Sedangkan dalam target RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten kebumen pada tahun 2025 sebesar 85,18 persen dengan realisasi 74,27 persen. belum tercapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2025 jalan dengan kondisi rusak berat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,95 persen atau sepanjang 19,764 km. Peningkatan kerusakan jalan tersebut

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingginya volume lalu lintas, kondisi cuaca, sistem drainase yang belum optimal, serta faktor umur perkerasan jalan. Adapun rumus perhitungan persentase jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap yaitu :

(Perhitungan realisasi menggunakan Presentase Perbandingan (jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / jumlah panjang jalan Kabupaten x 100%).

Tabel 3.10
Capaian Jalan Kab. Kebumen Dalam Kondisi Mantap Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	IKU OPD, Program / Kegiatan Pendukungnya	Sat	Kondisi awal Th.2021	Tahun 2024			Akhir RPJMD 2026
				Tar	Real	Cap	
1	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	78,27	79,48	73,48	92,45	85,18

No	IKU OPD, Program / Kegiatan Pendukungnya	Sat	Kondisi awal Th.2021	Tahun 2025			Akhir RPJMD 2026
				Tar	Real	Cap	
1	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	78,27	85,18	74,27	87,19	85,18

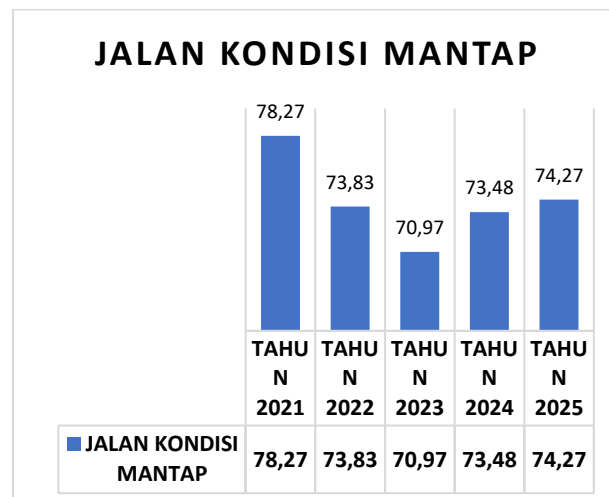
Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Tabel 3.11
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi di Kab. Kebumen 2021-2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2021-2026	REAL KINERJA TAHUN 2021 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2022 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2023 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2024 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2025 (km)	REAL KINERJA TAHUN 2026 (km)
KONDISI JALAN							
a. BAIK	-	584,109	292,179	450,569	411,814	470,960	-
b. SEDANG	-	167,516	416,841	271,269	335,543	284.430	-
c. RUSAK RINGAN	-	115,411	162,026	157,790	166,827	139,030	-
d. RUSAK BERAT	-	93,322	89,312	137,522	102,966	122,730	-

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Gambar 3.2
Capaian Jalan Kondisi Mantap di Kab. Kebumen 2021-2025



Sumber : DPUPR Kab. Kebumen,2025

Berdasarkan data capaian jalan kondisi mantap dari tahun 2021-2025 dapat disimpulkan bahwa persentase jalan kondisi mantap pada periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dan belum mengalami peningkatan yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan peningkatan jalan telah memberikan hasil, tetapi belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju kerusakan jalan yang dipengaruhi oleh tingginya volume lalu lintas, adanya kendaraan dengan muatan dan dimensi melebihi ketentuan (*Over Dimension Over Loading*), kondisi cuaca, sistem drainase yang belum optimal, serta faktor umur perkerasan jalan.

Adapun **solusi** untuk meningkatkan persentase jalan kondisi mantap secara berkelanjutan, diperlukan penguatan strategi pemeliharaan dan peningkatan jalan melalui pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala yang lebih terencana dan tepat sasaran, khususnya pada ruas jalan dengan tingkat lalu lintas tinggi dan umur perkerasan yang sudah tua. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sistem drainase jalan guna mengurangi kerusakan akibat genangan air dan pengaruh cuaca ekstrem. Upaya penanganan juga perlu diarahkan pada penggunaan material dan metode konstruksi yang lebih tahan terhadap beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Di sisi lain, penguatan perencanaan dan prioritas anggaran pada ruas jalan strategis, serta peningkatan monitoring dan evaluasi kondisi jalan secara berkala, diharapkan dapat menekan laju kerusakan dan mendorong peningkatan persentase jalan kondisi mantap pada tahun-tahun berikutnya.

2. Cakupan Pelayanan Air Bersih

Pada tahun 2025 Jumlah rumah tangga yang sudah terlayani air bersih sebesar 482.703 KK Sedangkan jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan pelayanan sebesar 482.703 KK, adapun Capaian indikator sasarnya sebesar 100 persen. Capaian pelayanan air bersih sesuai dengan SPM mencakup keseluruhan dengan 3 (tiga) sumber perolehan air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu melalui PDAM, SPAM Pedesaan dan Sumber air lain (Sumur, langsung dari mata air). namun angka tersebut sudah

memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100 persen rumah tangga telah memiliki akses air minum. Adapun rumus perhitungan persentase pelayanan air bersih perpipaan adalah sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Realisasi Menggunakan Persentase Perbandingan
(Jumlah RT terlayani air bersih / jumlah rumah tangga) x 100.

Tabel 3.12
Capaian Pelayanan Air Bersih Sesuai dengan Target SPM Tahun 2024 dan 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2024							Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = (7):(3)x100%	TARGET	
			PDAM	SPAM PERDES AAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.112	37.357	51.853	386.902	476.112	100%	100%	Keterse diaan Dana & Mata Air

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2025							Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = (7):(3)x100%	TARGET	
			PDAM	SPAM PERDES AAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	482.703	41.067	52.550	389.086	482.703	100%	100%	Keterse diaan Dana & Mata Air

Sumber : DPUPR Kab. Kebumen,2025

Tabel 3.13
Realisasi Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Program	TAHUN 2024					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya		Jumlah orang yang Terlayani		Jumlah = (3)+(4)	Capaian= (5): (2)x100%
		Sambungan Rumah Ta.2024	PDAM	SPAM Perdesaan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2024	1.441.425	89.210	142.736	214.104	356.840	24.76%

Indikator Program	TAHUN 2025					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya		Jumlah orang yang Terlayani		Jumlah = (3)+(4)	Capaian= (5): (2)x100%
		Sambungan Rumah Ta.2025	PDAM	SPAM Perdesaan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2025	1.451.748	93.617	158.273	216.195	374.468	25.79%

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan pada Tahun 2025 yang melalui jalur perpipaan yang digunakan rumah tangga sejumlah 374.468 jiwa *sedangkan* Total Jumlah Penduduk Seluruhnya pada tahun 2025 sebesar 1.451.748 jiwa atau realisasi sebesar 25,79 persen lebih tinggi dari target OPD yang direncanakan sebesar 23,75 persen. Angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100 persen rumah tangga telah memiliki akses air minum sampai dengan Tahun 2025, dimana realisasi SPM mencapai 108,59 persen.

Keberhasilan indikator ini didukung anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, serta ketersediaan sumber mata air dan pengelola (Kelompok Pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan terutama bagi daerah yang krisis air bersih. Walaupun demikian pembangunan SPAM tetap perlu ditingkatkan khususnya peningkatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan karena mayoritas akses masyarakat terhadap air minum bersumber dari bukan jaringan perpipaan. Akses sumber air minum jaringan perpipaan lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, adapun kegiatannya meliputi : pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM jaringan perpipaan, peningkatan SPAM jaringan perpipaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air minum perpipaan (SPAM).

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis Cakupan Pelayanan Air Bersih Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	IKU OPD, Program/Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2024			Target Akhir RPJMD 2026
				Target	Real	Cap	
1.	Cakupan pelayanan air bersih	%	18,75	22,50	24,76	110,04	25,00

No	IKU OPD, Program/Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2025			Target Akhir RPJMD 2026
				Target	Real	Cap	
1.	Cakupan pelayanan air bersih	%	18,75	23.75	25.79	108.61	25.00

Sumber : DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Gambar 3.3
Capaian Air Bersih Tahun 2021-2025



Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Capaian pelayanan air bersih sejak Tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 87,80 persen pada Tahun 2021 menjadi 96,84 persen pada Tahun 2022 dan 97,29 persen pada Tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2024 dengan capaian 110,04 persen, didukung oleh bertambahnya jumlah penduduk terlayani. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk yang terlayani air bersih perpipaan kembali meningkat, namun capaian kinerja menurun menjadi 108,61 persen akibat peningkatan target dan pertambahan jumlah penduduk. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam memperluas akses pelayanan air bersih secara berkelanjutan. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian pelayanan air bersih secara berkelanjutan, **solusi** diarahkan melalui pembangunan

SPAM jaringan perpipaan guna memperluas cakupan pelayanan air minum, khususnya pada wilayah yang belum terlayani. Selain itu, dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan untuk meningkatkan kapasitas, kontinuitas, dan kualitas layanan air minum seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Di sisi lain, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM perpipaan terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga keberlanjutan layanan, termasuk dalam aspek operasi dan pemeliharaan dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas pengelolaan, diharapkan pelayanan air bersih dapat terus meningkat secara merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada Tahun 2025 total luasan jaringan irigasi adalah 12.260,00 Ha, kondisi baik sebesar 9.667,36 ha (78,85%), kondisi sedang 172,02 ha (1,40%) , kondisi rusak ringan 138,35 ha (1,13%), dan kondisi rusak berat 2.282,27 ha (18,62%). Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dimana capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 9.655,36 ha atau (78,75%) , Meskipun begitu target pada tahun 2025 belum sesuai target dari 85 persen dan realisasi baru mencapai 78,85 persen atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya kejadian bencana sehingga menyebabkan beberapa titik jaringan irigasi mengalami longsor dan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran pada renstra dengan tidak dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi, sehingga kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi yang sebelumnya direncanakan melalui sumber dana tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal, serta masih ada banyaknya saluran irigasi dan bendungan yang masih mengalami kerusakan sebesar 2.420,62 ha atau 19,75 persen yang masih membutuhkan perbaikan dan perawatan. **Upaya/solusi** yang dapat dilakukan antara lain dengan memprioritaskan rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pada ruas dengan tingkat kerusakan berat dan ringan yang berdampak langsung terhadap luas layanan pertanian. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui skema lain, seperti bantuan keuangan provinsi. Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana juga perlu diperkuat melalui perencanaan teknis yang adaptif, perbaikan konstruksi yang lebih tahan terhadap longsor, serta meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi. Di samping itu, pemberdayaan dan penguatan peran masyarakat/pengelola irigasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi perlu ditingkatkan agar kerusakan dapat diminimalkan dan keberlanjutan fungsi jaringan tetap terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat meningkat secara bertahap dan target Renstra dapat tercapai. Adapun rumus perhitungan persentase infrastruktur sumber daya air kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

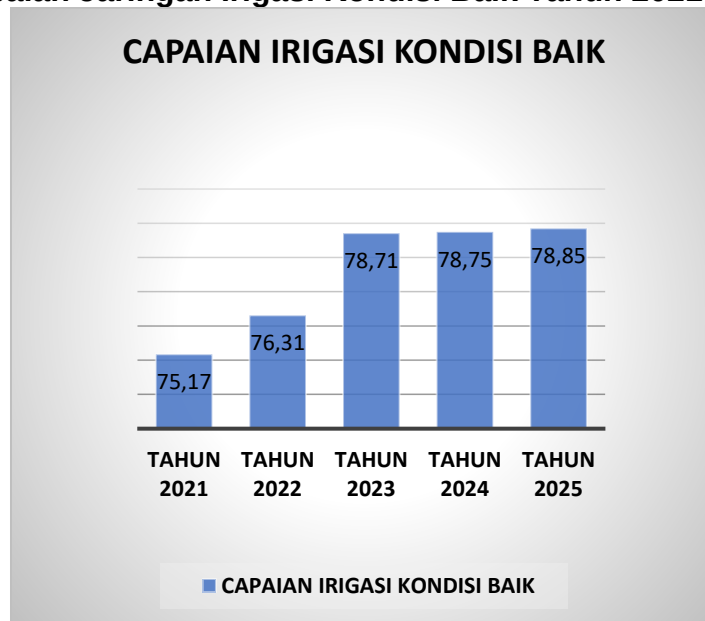
Rumus perhitungan realisasi menggunakan perbandingan (jumlah luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik / total luasan jaringan irigasi x 100%).

Tabel 3.15
Capaian Jaringan Irigasi kabupaten dalam Kondisi Baik

No	IKU OPD, Program/ Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th 2021	TAHUN 2024			Target. Akhir RPJMD 2026
				Tar	Real	Cap	
1	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	75,17	82,50	78,75	95,45%	87,5
				TAHUN 2025			
				Tar	Real	Cap	
				85	78,85	92,76%	87,5

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Gambar 3.4
Capaian Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun 2021-2025



Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Berdasarkan data capaian irigasi kondisi baik tahun 2021–2025 yang menunjukkan peningkatan bertahap dari 75,17 persen pada Tahun 2021 menjadi 78,85 persen pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa upaya pencapaian sasaran strategis telah berjalan secara berkelanjutan. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi dengan luas di bawah 1.000 Ha dalam satu wilayah kabupaten/kota, yang didukung melalui subkegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi, serta penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa. Sinergi antara pelaksanaan subkegiatan dan dukungan pendanaan berkontribusi langsung terhadap perbaikan kondisi jaringan irigasi, sehingga mendorong peningkatan persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun ke tahun.

f). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran, perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran menggunakan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK_i - RAK_i) \times CK_i}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E :Efisiensi
- PAKi :Pagu Anggaran Keluaran i
- RAKi :Realisasi Anggaran Keluaran i
- CKi :Capaian Keluaran i

Tabel 3.16
Tabel Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pembilang (efisiensi) (5*4%)-6	Penyebut (efisiensi) (5*4%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100	100	100%	20.830.000	20.682.200	99,29%	147.800	20.830.000
Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67	59,64	93,67%	175.435.952.600	170.297.625.577	97,07%	-5.965.911.849	164.331.713.728
				175.456.782.600	170.318.307.777	Jumlah	-5.965.764.049	164.352.543.728
						Efisiensi	-3,63%	

Sumber :DPUPR Kab.Kebumen,2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berada pada angka -3,63 persen, dari pagu anggaran neto rentang nilai antara (-20% sampai dengan 20%). Ditinjau dari aspek efisiensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.

2. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Efisiensi penggunaan SDM dilihat dari kesesuaian antara jumlah pegawai yang tersedia dengan kebutuhan ideal berdasarkan formasi jabatan. Perbandingan kondisi eksisting dan kebutuhan pegawai menurut kelompok jabatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Kebutuhan dan Realisasi SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen

No	Kelompok Jabatan	Pegawai Tersedia	Kebutuhan Ideal	Persentase
1	JPT	1	1	100%
2	Administrator	5	5	100%
3	Pengawas	11	14	78,57%
4	Fungsional	37	87	42,53%
5	Pelaksana	174	244	71,31%
Total		228	351	64,96%

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kebumen baru mencapai 64,96 persen dari kebutuhan ideal. Meskipun demikian, dalam melaksanakan 10 program, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 96,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah SDM tidak menghambat secara signifikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

g). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis keterkaitan sasaran dengan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan Tahun 2025

Ketercapaian Sasaran dengan Program Kegiatan Tahun 2020						
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	Menunjang
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	Menunjang
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah						
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	93,67%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	92,76%	Menunjang
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konservasi SDA yang Terbangun dan Terpelihara	100%	Menunjang

			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Irigasi yang Terlayani	100%	Menunjang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	108,59%	Menunjang
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani	122,64%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Mantap	87,19%	Menunjang
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang Tertangani	126.63%	Menunjang

Sumber : DPUPR Kab.Kebumen,2025

Berdasarkan hasil pemetaan pada tabel diatas, keterkaitan tujuan/sasaran dengan program serta kegiatan, dikatakan bahwa seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada tahun 2025, telah menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Persentase penanganan sengketa lahan mencapai 100 persen, menunjukkan efektivitas pelaksanaan program penyelesaian sengketa tanah garapan, sedangkan pada indeks kualitas infrastruktur pekerjaan umum, capaiannya sebesar 93,67 persen menunjukan kategori sangat tinggi pada kriteria penilaian realisasi kinerja, adapun perhitungan dari capaian tersebut didukung oleh kinerja program pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program penyelenggaraan jalan.

Program yang memiliki capaian diatas 100 persen yakni program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi capaian sebesar 108,59 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Dampak positif dari keberhasilan program tersebut antara lain:

1. Meningkatnya akses masyarakat Kabupaten Kebumen terhadap air minum layak khususnya bagi daerah-daerah di Kabupaten Kebumen yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau seperti : Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Alian dan Padureso.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat seiring berkurangnya ketergantungan pada air minum tidak terlindungi seperti : sumur gali, air sungai dan penampung air hujan
3. Keberhasilan ini juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran Belanja

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 219.364.976.583 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 212.068.150.477 (96,67%). Realisasi total anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tertuang dalam tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.19
Realisasi Keuangan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Kebumen

Nama Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran			
	Pagu	Realisasi	Cap (%)	Deviasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.530.060.000	20.345.988.036	94,50%	5,50%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.467.000	148.186.582	95,32%	4,68%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.745.000	61.327.676	93,28%	6,72%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.722.000	86.858.906	96,81%	3,19%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.660.306.000	18.593.853.183	94,58%	5,42%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.248.216.000	18.200.122.956	94,55%	5,45%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	412.090.000	393.730.227	95,54%	4,46%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.039.000	86.688.204	84,96%	15,04%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.039.000	86.688.204	84,96%	15,04%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.646.000	265.339.441	98,04%	1,96%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.315.000	37.064.300	99,33%	0,67%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.780.000	66.750.200	99,96%	0,04%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.674.000	20.492.440	99,12%	0,88%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.996.000	99,96%	0,04%
Penyediaan Bahan/Material	56.400.000	56.354.700	99,92%	0,08%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.414.000	61.699.701	92,90%	7,10%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.063.000	12.982.100	99,38%	0,62%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.114.000	203.398.350	96,35%	3,65%
Pengadaan Mebel	40.000.000	39.127.900	97,82%	2,18%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.114.000	164.270.450	96,00%	4,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.558.000	392.618.385	83,08%	16,92%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.812.000	90,60%	9,40%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	220.467.185	73,49%	26,51%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.558.000	170.339.200	99,87%	0,13%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.930.000	655.903.891	99,69%	0,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.892.000	443.720.891	99,96%	0,04%

Pemeliharaan Mebel	20.000.000	19.929.000	99,65%	0,36%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.544.000	59.265.000	99,53%	0,47%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.494.000	132.989.000	98,88%	1,12%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.820.461.600	2.781.922.586	98,63%	1,37%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.396.100	227.045.650	98,98%	1,02%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	84.986.250	84.399.150	99,31%	0,69%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	144.409.850	142.646.500	98,78%	1,22%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.591.065.500	2.554.876.936	98,60%	1,40%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	665.253.500	639.407.364	96,11%	3,89%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	879.755.000	878.919.972	99,91%	0,09%
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	482.902.000	481.271.700	99,66%	0,34%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	563.155.000	555.277.900	98,60%	1,40%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.891.815.400	6.594.979.050	95,69%	4,31%

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.891.815.400	6.594.979.050	95,69%	4,31%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase lingkungan	6.614.999.400	6.323.615.650	95,60%	4,40%
Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan Tekhnis Sistem Draenase Lingkungan	276.816.000	271.363.400	98,03%	1,97%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.116.630.000	3.961.797.167	96,24%	3,76%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.116.630.000	3.961.797.167	96,24%	3,76%
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	3.985.653.000	3.837.375.567	96,28%	3,72%
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000	96.126.000	96,13%	3,87%
Pembinaan dan pemeberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air minum (SPAM)	30.977.000	28.295.600	91,34%	8,66%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.063.618.683	12.740.634.316	97,53%	2,47%

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.063.618.683	12.740.634.316	97,53%	2,47%
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	119.474.600	105.892.500	88,63%	11,37%
Pembangunan, pemanfaatan , pelestarian dan pembongkaran, Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.352.553.000	12.088.611.532	97,86%	2,14%
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	101.857.300	64.441.220	63,27%	36,73%
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan Gedung	37.475.683	36.361.198	97,03%	2,97%
Pemeliharaan, Perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis Bangunan Daerah Kabupaten/Kota	452.258.100	445.327.866	98,47%	1,53%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.663.263.900	1.388.295.322	83,47%	16,53%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.663.263.900	1.388.295.322	83,47%	16,53%

Pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.202.362.900	939.302.000	78,12%	21,88%
Penyusunan Rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah kabupaten/kota	460.901.000	448.993.322	97,42%	2,58%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	93.044.000	91.298.778	98,12%	1,88%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	43.830.000	43.312.300	98,82%	1,18%
Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	17.010.000	16.671.300	98,01%	1,99%
Pelatihan Tenaga kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis	26.820.000	26.641.000	99,33%	0,67%
Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	49.214.000	47.986.478	97,51%	2,49%
Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten / kota	49.214.000	47.986.478	97,51%	2,49%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.498.861.000	163.553.905.824	97,07%	2,93%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	168.498.861.000	163.553.905.824	97,07%	2,93%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.539.053.000	1.515.734.100	98,48%	1,52%
Pembangunan Jalan	785.039.000	85.682.200	10,91%	89,09%
Pemeliharaan Berkala Jalan	113.341.609.000	110.365.345.146	97,37%	2,63%

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	622.001.000	616.527.130	99,12%	0,88%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	28.000.000.000	27.376.079.712	97,77%	2,23%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.878.000	196.746.000	98,43%	1,57%
Pembangunan Jembatan	2.210.650.000	2.155.330.500	97,50%	2,50%
Pemeliharaan Berkala Jembatan	2.750.000.000	2.690.571.500	97,84%	2,16%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	549.497.000	525.225.000	95,58%	4,42%
Pemeliharaan Rutin Jalan	18.301.134.000	17.829.404.536	97,42%	2,58%
Pelebaran jembatan	200.000.000	197.260.000	98,63%	1,37%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	666.392.000	588.647.198	88,33%	11,67%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	199.239.000	198.140.815	99,45%	0,55%
Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR Kabupaten/kota	199.239.000	198.140.815	99,45%	0,55%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	369.992.000	293.712.566	79,38%	20,62%
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	350.042.000	273.904.766	78,25%	21,75%
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	19.950.000	19.807.800	99,29%	0,71%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77.839.000	77.684.925	99,80%	0,20%
Pelaksanaan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	41.153.000	41.079.228	99,82%	0,18%
Sistem Informasi Penataan Ruang	36.686.000	36.605.697	99,78%	0,22%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	19.322.000	19.108.892	98,90%	1,10%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	19.322.000	19.108.892	98,90%	1,10%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.830.000	20.682.200	99,29%	0,71%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000	20.682.200	99,29%	0,71%
Mediasi Penyelesaian Kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000	20.682.200	99,29%	0,71%
TOTAL	219.364.976.583	212.068.150.477	96,67%	3,33%

Sumber : Laporan Simpel DPUPR Kab. Kebumen, 2025

Total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 219.364.976.583 terealisasi sebesar Rp. 212.068.150.477 (96,67%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.296.826.106 (3,33%) dari total pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a) Adanya program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 21.530.060.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 20.345.988.036, dimana terdapat efisiensi belanja BBM dan narasumber pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, terdapat sisa penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan sisa belanja patok dan efisiensi BBM pada sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD, serta terdapat efisiensi perjalanan dinas pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- b) Adanya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebesar Rp. 4.116.630.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 3.961.797.167 dimana terdapat efisiensi anggaran narasumber pada sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)

- c) Adanya program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp. 13.063.618.683 dan yang terealisasi sebesar Rp. 12.740.634.316 dikarenakan terdapat sisa tender dan efisiensi pada kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan Gedung negara untuk kepentingan strategis Kabupaten/Kota dan pada sub kegiatan penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
- d) Adanya program penataan bangunan dan lingkungannya sebesar Rp. 1.663.263.900 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.388.295.322 karena terdapat sisa tender pada sub kegiatan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
- e) Adanya program penyelenggaraan jalan sebesar Rp. 168.498.861.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 163.553.905.824 karena belum turunnya rekomendasi tukar menukar tanah wakaf dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah pada sub kegiatan pembangunan jalan
- f) Adanya program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp. 666.392.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 588.647.198 karena terdapat sisa tender pekerjaan belanja pada sub kegiatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota.

BAB IV PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Penilaian yang dilakukan mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan masuk dalam kriteria sangat baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Target Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tercapai sebesar 59,64 persen meliputi Indikator Presentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan target sebesar 85,00 persen dapat terealisasi sebesar 78,85 persen dengan nilai capaian 92,76 persen. Kemudian Indikator Persentase Pelayanan Air Bersih dengan target sebesar 23,75 persen dapat terealisasi sebesar 25,79 persen atau dengan nilai capaian 108,59 persen sedangkan indikator Presentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi mantap dengan target 85,18 persen, dapat terealisasi sebesar 74,27 persen dengan nilai capaian 87,19 persen

- 2) Secara Umum Capaian kinerja program DPUPR Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 dikategorikan baik adapun rata-rata tercapai sebesar 96,65 persen, dimana terdapat beberapa program di DPUPR yang capaiannya kurang dari 100 persen yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Penyelenggaraan Jalan
- 3) Realisasi capaian keuangan secara keseluruhan sebesar 96,67 persen. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2025 telah disediakan dana sebesar Rp. 219.364.976.583 dan realisasi sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp. 212.068.150.477.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Meskipun Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen dengan sasaran dan program Tahun 2025 dapat terpenuhi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis yang perlu diantisipasi di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut meliputi :

- 1) Belum optimalnya dukungan anggaran pendamping yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi, maupun APBD Kabupaten dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur drainase dan irigasi, sehingga beberapa kegiatan belum dapat diselesaikan sesuai dengan target dan jadwal yang telah direncanakan.
- 2) Penetapan target kinerja pada beberapa kegiatan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan anggaran kas, termasuk besaran anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pencapaian kinerja.

- 3) Masih perlunya peningkatan infrastruktur karena masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya volume lalu lintas, kondisi cuaca, sistem drainase yang belum optimal, serta faktor umur perkerasan jalan.
- 4) Masih ditemukan daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) karena pengelolaan yang tidak baik
- 5) Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air
- 6) Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau

4.3 Rekomendasi

Beberapa strategi guna peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan di Tahun 2026, antara lain:

- 1) Perlu Dukungan Anggaran Pendamping baik dari Pusat, Banprov serta APBD, Kabupaten dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur drainase dan irigasi sehingga kegiatan-kegiatan yang kinerjanya belum dapat mencapai target dapat selesai sesuai yang sudah direncanakan/dijadwalkan
- 2) Penetapan target kinerja disesuaikan dengan mempertimbangkan anggaran kas yang ada, termasuk besarnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.
- 3) Perlu dilakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada ruas jalan prioritas. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan teknis, optimalisasi sistem drainase jalan, serta penggunaan material sesuai standar guna meningkatkan kemantapan jalan dan memperpanjang umur layanan perkerasan.

- 4) Perlu dilakukan optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan guna memperluas cakupan pelayanan air minum, khususnya pada wilayah yang belum terlayani. Selain itu, dilakukan peningkatan SPAM jaringan perpipaan untuk meningkatkan kapasitas, kontinuitas, dan kualitas layanan air minum seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan sarana secara berkelanjutan, agar pelayanan air minum kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
- 5) Perlu dilakukan peningkatan fungsi dan kapasitas bangunan drainase melalui rehabilitasi, normalisasi saluran, serta penataan sistem drainase secara terpadu guna mengurangi genangan air dan meningkatkan efektivitas pengendalian limpasan air hujan.
- 6) Perlu dilakukan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjangkau wilayah pertanian yang belum terlayani, khususnya di daerah rawan kekeringan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan efisiensi distribusi air irigasi melalui perbaikan bangunan irigasi dan penguatan peran kelembagaan petani pemakai air agar ketersediaan air irigasi dapat terjaga terutama pada musim kemarau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermfaat bagi semua pihak, atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19700728 199803 1 006

LAMPIRAN

LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja dan
Pengukuran Kinerja Tahun
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128

Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com

Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Joni Hernawan, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700728 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 Indeks	90,91** Indeks				
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 Persentase	100 Persentase				100
	Tujuan :							
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89 Indeks	66,89 Indeks				
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	63,67 Indeks	63,67 Indeks				63,67

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.918.860.000,-	Rp. 21.530.060.000,-	APBD Kab
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 15.793.006.000,-	Rp. 2.820.461.600,-	APBD Kab
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 894.130.000,-	Rp. 4.116.630.000,-	APBD Kab
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.669.045.000,-	Rp. 6.891.815.400,-	APBD Kab
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 24.405.833.000,-	Rp. 13.063.618.683,-	APBD Kab
6.	Program Penataan Bangunan dan	Rp. 758.764.000,-	Rp. 1.663.263.900,-	APBD Kab



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.	Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 51.466.169.000,-	Rp. 160.498.861.000,-	APBD Kab
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 101.114.000,-	Rp. 93.044.000,-	APBD Kab
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 791.201.000,-	Rp. 666.392.000,-	APBD Kab
10.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 20.830.000,-	APBD Kab
TOTAL		Rp. 118.828.122.000,-	Rp. 211.364.976.583,-	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hj. Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700728199831006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Anggorowati, S.KM, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Joni Hernawan, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Tri Anggorowati, S.KM, M.Si
NIP. 19680318 199203 2 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,50 indeks	90,91** indeks	85,50	85,50	90,91* *	90,91**
	Sasaran:							
2.	Meningkatnya Perencanaan Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	25%	50%	75%	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.918.860.000,-	Rp. 21.530.060.000,-	APBD Kab.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 164.388.000,-	Rp. 155.467.000,-	APBD Kab.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 20.998.695.000,-	Rp. 19.660.306.000,-	APBD Kab.
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 109.928.000,-	Rp. 102.039.000,-	APBD Kab.
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 300.048.000,-	Rp. 270.646.000,-	APBD Kab.
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 211.721.000,-	Rp. 211.114.000,-	APBD Kab.
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 469.133.000,-	Rp. 472.558.000,-	APBD Kab.
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 664.947.000,-	Rp. 657.930.000,-	APBD Kab.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Tri Anggorowati, S.KM, M.Si
NIP. 19680318 199203 2 005

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Khusni Tamrin, S. ST.,M.T
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Joni Hernawan, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T
NIP. 19700728 199803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Khusni Tamrin, S. ST.,M.T
NIP. 19791109 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubaha n	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan umum	63,67 Indeks	63,67 Indeks				63,67
1	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Perpipaan	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	23,75 %	23,75 %				23,75
2	Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintahan dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	83,84 %	83,84 %				83,84
3	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	15,00 %	15,00 %				15,00
4	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	64,92 %	64,92 %				64,92

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
I	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 894.130.000,-	Rp. 4.116.630.000,-	APBD Kab.
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 894.130.000,-	Rp. 4.116.630.000,-	APBD Kab.
II	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 24.405.833.000,-	Rp. 13.063.618.683,-	APBD Kab.
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	Rp. 24.405.833.000,-	Rp. 13.063.618.683,-	APBD Kab.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

III	Fungsi Bangunan Gedung				
	Program Penataan				
	Bangunan Dan	Rp. 758.764.000,-	Rp. 1.663.263.900,-	APBD Kab.	
	Lingkungannya				
1	Penyelenggaraan Penataan				
	Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 758.764.000,-	Rp. 1.663.263.900,-	APBD Kab.	
	di Daerah Kabupaten/Kota				
IV	Program Pengembangan	Rp. 101.114.000,-	Rp. 93.044.000,-	APBD Kab.	
	Jasa Konstruksi				
1	Penyelenggaraan Pelatihan	Rp. 50.360.000,-	Rp. 43.830.000,-	APBD Kab.	
	Tenaga Terampil Konstruksi				
2	Penyelenggaraan Sistem				
	Informasi Jasa Konstruksi	Rp. 50.754.000,-	Rp. 49.214.000,-	APBD Kab.	
	Cakupan Daerah Kabupaten/				
	Kota				

Kebumen, 22 Oktober 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Khusni Tamrin, S. ST., M.T
NIP. 19791109 199903 1 004

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Niken Ratna Widiastuti, S.Si, M.Eng
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Joni Hernawan, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Niken Ratna Widiastuti, S.Si, M.Eng.
NIP. 9820119 200604 2 015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesesuaian Lahan Dalam Pola Ruang RTRW	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	91,45 %	91,45 %				91,45
2	Meningkatnya Penanganan Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
I	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 791.201.000,-	Rp. 666.392.000,-	APBD Kab.
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp. 258.398.000,-	Rp. 199.239.000,-	APBD Kab.
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 419.373.000,-	Rp. 369.992.000,-	APBD Kab.
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 86.930.000,-	Rp. 77.839.000,-	APBD Kab.
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.500.000,-	Rp. 19.322.000,-	APBD Kab.
II	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 20.830.000,-	APBD Kab.
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000,-	Rp. 20.830.000,-	APBD Kab.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Tata Ruang Dan
Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Niken Ratna Widiastuti, S.Si, M.Eng.
NIP. 9820119 200604 2 015

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Kurnia Hadi, S.T
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Joni Hernawan, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kurnia Hadi, S.T
NIP. 19750511 201001 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan umum	63,67 Indeks	63,67 Indeks				63,67
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	85,18 %	85,18 %				85,18 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
I	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 51.466.169.000,-	Rp 160.498.861.000,-	APBD Kab.
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 51.466.169.000,-	Rp 160.498.861.000,-	APBD Kab.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kurnia Hadi, S.T
NIP. 19750511 201001 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 381128
Faksimile (0287) 382821, Laman www.dpupr.kebumenkab.go.id
Pos-el dpupr.kebumenkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Katarina Nety Dwicahyaningsih, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Joni Hernawan, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Katarina Nety Dwicahyaningsih, S.T., M.T.
NIP. 19810426 200903 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan umum	63,67 Indeks	63,67 Indeks				63,67
1	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	85,00 %	85,00 %				85,00
2	Meningkatnya Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	19,98 %	19,98 %				19,98

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 15.793.006.000,-	Rp. 2.820.461.600,-	APBD Kab.
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 154.110.000,-	Rp. 229.396.100,-	APBD Kab.
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.638.896.000,-	Rp. 2.591.065.500,-	APBD Kab.
II	Program Pengelolaan Dan	Rp. 1.669.045.000,-	Rp. 6.891.815.400,-	APBD Kab.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Pengembangan Sistem
Drainase**

- 1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Rp. 1.669.045.000,- Rp. 6.891.815.400,- APBD Kab.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Joni Hernawan, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Katarina Nety Dwicahyaningsih, S.T., M.T.
NIP. 19810426 200903 2 003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H.M. Sribini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran	Target Kinerja Murni	Target Kinerja Perubahan	Triwulan										Realisasi	Capaian	Permasalahan	Catatan
						I		II		III			IV						
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi				
	Tujuan :					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5	90,91**	85,5	91,56	85,5	90,36	85,5	90,91**	87,21	85,5	90,91**	90,35	89,87	98,85		
	Sasaran :																		
	Terbangunnya Kawasan Sengjata Lahan	Persentase Penanganan Sengjata Lahan	Persentase	100	100								100	100	100	100	100		
	Tujuan :																		
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	66,89	66,89														
	Sasaran :																		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	63,67	63,67	63,67	59	63,67	59	63,67	63,67	59	63,67	63,67	59,64	59,64	93,67		
	Sasaran :																		

Kebumen, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERNAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan H.M. Barbi No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
 Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
 Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Mursi	Target Kinerja Perkebunan	Triwulan									Realisasi	Capaian	Pencapaian	Salah
						I		II		III			IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Mursi	Target Perkebunan	Realisasi	Target Mursi	Target Perkebunan	Realisasi			
Tahun																		
1.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,5	90,91**	85,5	91,56	85,5	90,33	85,5	90,91**	87,21	85,5	90,91**	90,33	89,87	98,85	
Semester																		
2.	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Utang Kewajiban dan Kewajiban	Cakupan Pelayanan Pemenuhan Utang Kewajiban dan Kewajiban	%	100	100	25	19,25	50	48,78	75	75	74,90	100	100	92,1875	92,19	92,19	Adanya efisiensi anggaran yang signifikan sehingga terdapat 1 kegiatan pada kegiatan Administrasi Kewajiban Pemenuhan dan Kewajiban

Kebumen, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERAWAN, S.T., M.T.
 NIP. 19700728 199803 1 006

SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

TRIANGGOREWATI, S.KM, M.Si
 NIP. 19680318 199203 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alamat : Jalan H.M. Sertini No. 99 Kebumen, Telpun (0287) 381128
 Faks (0287) 382821 e-mail : dpu@kebumenkab.go.id
 Website : www.dpu@kebumenkab.go.id Ekdipus 54316

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIMULAN IV TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Maret	Target Kinerja Pembekuan	Terdapan										Realisasi	Capaian	Pencapaian	Sifat
						I		II		III		IV							
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Maret	Target Pembekuan	Realisasi	Target Maret	Target Pembekuan	Realisasi				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pelaksanaan umum	Indeks	62,67	62,67	62,67	58	62,67	58	62,67	62,67	58	62,67	62,67	59,64	59,64	93,67		
2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Berwawasan Kelangkaan Air Bersih	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Berwawasan Kelangkaan Air Bersih	%	85	85	85	76,75	85	76,75	85	85	76,75	85	85	74,65	76,65	92,76	Dimulai dengan dengan meningkatnya anggaran untuk pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi TA 2023	
3	Meningkatnya Kualitas Drainase Jalan Bersih	Persentase Saluran Drainase Jalan Bersih	%	10,00	10,00	10,00	16,25	10,00	16,25	10,00	10,00	16,25	10,00	10,00	16,43	16,43	82,22	Pekerjaan dipercepatkan di lokasi yang baru saja selesai pemeliharaan/korupsi jalan akan segera dilanjutkan pemantauan, sehingga target persentase kondisi baik tidak terdampak signifikan awal target persentase yang direncanakan	

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Joni Herjawan, S.T., M.T.
 NIP. 19700728 198802 1 006

Kebumen, 31 Desember 2023
 Kepala Bidang Sumber Daya Air
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Katarina Ningsih, S.T., M.T.
 NIP. 19610426 200903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alamat : Jalan M.M. Barlian No. 99 Kebumen, Telpun (0287) 381128
 Faks (0287) 381821 e-mail: dpupr.kabupatenkebumen@gmail.com
 Website: www.dpupr.kabupatenkebumen.go.id Kodepos 34316

LAPORAN PENYUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Kawasan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Murni	Target Kinerja Perbaikan	Terdapat										Realisasi	Capaian	Persentase	Status
						I		II		III		IV							
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Murni	Target Perbaikan	Realisasi I	Target Murni	Target Perbaikan	Realisasi I				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	82,87	82,87	82,87	98	82,87	98	82,87	82,87	82,87	82,87	82,87	82,87	98,64	98,64	98,64	
1	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Masyarakat	Persentase Pelayanan Air Bersih Masyarakat	%	82,75	82,75	82,75	94,76	82,75	94,76	82,75	82,75	94,76	82,75	82,75	82,75	94,76	94,76	94,76	
2	Meningkatnya Anggaran Gedung Pemerintahan Jalan Kerdas Baru	Persentase Anggaran Gedung Pemerintahan Jalan Kerdas Baru	%	82,84	82,84	82,84	82,46	82,84	82,49	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	
2	Meningkatnya Anggaran dan Lingkungan yang Tersejahter	Persentase Anggaran dan Lingkungan yang Tersejahter	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100,00		
4	Meningkatnya Pengolahan Sampah Bersih yang Tidak Ditinggal dan Bersih	Persentase Pengolahan Sampah Bersih yang Tidak Ditinggal dan Bersih	%	84,92	84,92	84,92	85,08	84,92	80	84,92	84,92	84,92	84,92	84,92	84,92	84,92	84,92	100,00	

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dhuha Tahir, S. ST., M.T
 NIP. 19781104 199903 1 004

Kebumen, 31 Desember 2025
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

 JUSUS HERNAWAN, S.T., M.T
 NIP. 19700724 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alamat : Jalan H.M. Barotol No. 99 Kebumen, Telpun (0287) 381128
 Faks (0287) 383521 e-mail : dpupr.kebumenkab@gmail.com
 Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No	Sumber Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Mural	Target Kinerja Perbaikan	Triwulan									Realisasi	Capaian	Permasalahan	Salah
						I		II		III		IV						
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Mural	Target Perbaikan	Realisasi	Target Mural	Target Perbaikan	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan umum	Indeks	83,67	83,67	83,67	89	83,67	80	83,67	83,67	89	83,67	83,67	89,64	89,64	83,67	
1	Meningkatnya Substansi Jalan Keresidangan Kabupaten dalam Rantai Monev	Pemerataan Jalan Keresidangan Kabupaten dalam Rantai Monev	%	85,18	85,18	85,18	73,48	85,18	72,48	85,18	85,18	70,48	85,18	83,18	74,27	74,27	87,19	Pemerataan kondisi jalan dari sedang menjadi rusak ringan atau rusak berat yang disebabkan dari beberapa faktor seperti peningkatan Volume Lalu Lintas, rusak, drainase dan umur pavement sehingga target pemantapan jalan tidak naik signifikan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Kebumen

 Jumi Hidayat, S.T., S.T.
 NIP. 19700728 199003 1 006

Kebumen, 31 Desember 2025
 Kepala Bidang Bina Marga
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Kebumen

 Kurnia Hadi, S.T.
 NIP. 19750511 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128
Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com
Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Bahan	Target Kinerja Murni	Target Kinerja Perubahan	Triwulan										Realisasi	Capaian	Masalah	Solusi
						I		II		III			IV						
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi	Target Murni	Target Perubahan	Realisasi				
1	Meningkatnya Kesesuaian Lahan Dalam Pola Ruang RTRW	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	91,45	91,45	91,45	91,35	91,45	91,35	91,45	91,45	91,35	91,45	91,45	91,45	91,45	100,00		
2	Meningkatnya Penanganan Sampah Lahan	Persentase Penanganan Sampah Lahan	%	100	100	100	0	100	0	100	100	0	100	100	100	100	100		


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERNAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19700728 197003 1 006

Kebumen, 31 Desember 2025
KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN


NIKEN RATNA WIDIASTUTI, S.Si, M.Eng
NIP. 19820118 200604 2 015

**LAPORAN SIMPEL DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB.
KEBUMEN TAHUN 2025**

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KUANTITAS KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN DESEMBER**

KODE prr / lra / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KUANTITAS				REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KUANTITAS		FISIK (%)	SPJ			S/D BULAN INI (Rp)	FISIK (%)	KEU SPJ (%)	FISIK (%)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01	PROGRAM PERHUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.530.040.000		21.530.040.000	100,00	100,00	18.266.162.438	1.079.823.598	20.345.986.036	94,70	100,00	5,50	0,00		
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.487.000		155.487.000	100,00	100,00	130.080.531	10.106.051	148.186.582	95,32	100,00	4,68	0,00		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.745.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	65.745.000	100,00	100,00	57.763.676	3.564.900	61.327.676	93,28	100,00	6,72	0,00	Efisiensi Belanja BPP dan Harsumbar	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.722.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	89.722.000	100,00	100,00	80.316.855	6.542.051	86.858.906	96,81	100,00	3,19	0,00		
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.666.306.000		19.666.306.000	100,00	100,00	18.642.668.914	1.051.164.269	18.593.833.183	94,58	100,00	5,42	0,00		
1.03.01.2.02.0001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.248.216.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	19.248.216.000	100,00	100,00	16.293.621.030	1.806.501.926	18.200.122.956	94,55	100,00	5,45	0,00	Sisa Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp.1.048.093.044	
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	412.090.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	412.090.000	100,00	100,00	349.047.804	44.682.343	393.730.227	95,54	100,00	4,46	0,00		
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.039.000		102.039.000	100,00	100,00	81.031.197	5.657.007	86.688.204	84,96	100,00	15,04	0,00		
1.03.01.1.03.0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	102.039.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	102.039.000	100,00	100,00	81.031.197	5.657.007	86.688.204	84,96	100,00	15,04	0,00	Sisa Belanja Pokok RP. 10.520.000 dan Efisiensi BPP Rp. 4.835.796	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepagawisan Perangkat Daerah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.2.05.0011	Sertifikasi Sistem Implementasi Peraturan Perundang-undangan			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.646.000		270.646.000	100,00	100,00	246.678.705	18.660.736	265.339.441	98,04	100,00	1,96	0,00		
1.03.01.2.06.0001	Pembiayaan Komponen Indikasi Liris, Pemasangan Sampul dan Kertas	27.315.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	27.315.000	100,00	100,00	27.064.300		27.064.300	99,33	100,00	0,67	0,00		
JUMLAH		219.364.576.000		219.364.576.583	100,00	100,00	188.434.032.523	103.834.117.953	212.068.150.477	96,67	99,68	3,33	0,32		

KODE	NAMA KECATAN	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIANSI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SP1					KEU SP2	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
gns / kng / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.750.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	66.750.000	100,00	100,00	58.953.400	7.796.600	66.750.000	99,98	100,00	0,04	0,00		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.674.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	20.674.000	100,00	100,00	18.061.440	2.431.000	20.492.440	99,12	100,00	0,68	0,00		
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Sediaan dan Perawatan Perundang-undangan	10.000.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100,00	100,00	9.163.000	833.000	9.996.000	99,96	100,00	0,04	0,00		
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	56.400.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	56.400.000	100,00	100,00	55.404.700	950.000	56.354.700	99,92	100,00	0,08	0,00		
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.414.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	66.414.000	100,00	100,00	55.049.765	6.649.936	61.699.701	92,90	100,00	7,10	0,00	Efisiensi Perjalanan Dinas Rp. 4.714.300	
1.03.01.2.06.0010	Perbaikan/Aspek Dinamis pada SKPD	13.963.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	13.963.000	100,00	100,00	12.982.100		12.982.100	99,98	100,00	0,62	0,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	211.114.000		211.114.000	100,00	100,00	203.398.350		203.398.350	96,35	100,00	3,65	0,00		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil	40.000.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	40.000.000	100,00	100,00	39.127.900		39.127.900	97,82	100,00	2,18	0,00		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Meubelair	171.114.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	171.114.000	100,00	100,00	164.270.450		164.270.450	96,00	100,00	4,00	0,00		
1.03.01.2.08	Pemeliharaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	472.558.000		472.558.000	100,00	100,00	339.345.855	53.272.530	392.618.385	83,08	100,00	16,92	0,00		
1.03.01.2.08.0001	Pemeliharaan Jasa Samsat Menyurat	2.000.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100,00	100,00	1.750.000	22.000	1.812.000	90,60	100,00	9,40	0,00		
1.03.01.2.08.0002	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Lain-lain	300.000.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	300.000.000	100,00	100,00	195.604.135	24.863.020	220.467.155	73,49	100,00	26,51	0,00		
1.03.01.2.08.0004	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.558.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	170.558.000	100,00	100,00	141.951.700	28.367.500	170.339.200	99,87	100,00	0,13	0,00		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	657.930.000		657.930.000	100,00	100,00	614.950.806	40.945.005	655.903.891	99,89	100,00	0,31	0,00		
1.03.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Samsat Pemeliharaan, Pajak dan Retensi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.892.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	443.892.000	100,00	100,00	405.725.806	37.995.005	443.720.891	99,96	100,00	0,04	0,00		
1.03.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mobil	20.000.000	APSD (DAU/PAD/Lainnya)	20.000.000	100,00	100,00	19.029.000		19.029.000	99,65	100,00	0,35	0,00		
Jumlah		219.364.976.583		219.364.976.583	100,00	100,00	208.434.823.520	103.634.117.892	212.068.941.477	96,67	99,68	3,33	0,32		

KODE	NAMA KEJATAN	Jumlah ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KIDU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI						S/D BULAN INI
pro / reg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01.2.06.0006	Remediasi Perlatan dan Nadi Lainnya	39.544.000	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	39.544.000	100,00	100,00	36.315.000	2.890.000	39.265.000	99,53	100,00	0,47	0,00		
1.03.01.2.06.0008	Remediasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.494.000	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	134.494.000	100,00	100,00	132.988.000		132.988.000	99,68	100,00	1,12	0,00		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.830.481.800		2.830.481.800	100,00	100,00	2.361.014.778	526.907.608	2.781.812.386	98,63	100,00	1,37	0,00		
1.03.02.2.01	Pengukuhan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.396.100		229.396.100	100,00	100,00	126.352.450	100.693.300	227.045.650	98,98	100,00	1,02	0,00		
1.03.02.2.01.0009	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Perompang Air Lainnya	84.986.250	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	84.986.250	100,00	100,00	84.399.150		84.399.150	99,31	100,00	0,69	0,00		
1.03.02.2.01.0118	Pemeliharaan Pda dan Rencana Pengabdian SDA WS Sawerangan Kabupaten/Kota			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Perompang Air Lainnya			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.2.01.0126	Pemeliharaan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Perompang Air Lainnya	144.409.850	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	144.409.850	100,00	100,00	41.953.300	100.693.200	142.646.500	98,78	100,00	1,22	0,00		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengabdian Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Sawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.591.665.500		2.591.665.500	100,00	100,00	2.134.662.328	426.214.608	2.554.876.936	98,60	100,00	1,40	0,00		
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jangkar Irigasi Permukaan			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.0007	Pembangunan Jangkar Irigasi Air Tanah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.0008	Pemeliharaan Jangkar Irigasi Permukaan			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jangkar Irigasi Permukaan	665.253.500	APRO (DAL/PAD/Lainnya), DAK	665.253.500	100,00	100,00	622.790.250	16.707.108	639.407.364	96,11	100,00	3,89	0,00		
Jumlah		219.364.876.583		219.364.876.583	100,00	100,00	188.434.032.525	101.634.117.952	212.068.150.477	96,67	99,88	3,33	0,32		

KODE	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KELOMPOK					REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KELOMPOK		FISIK	SP3				KPU SP3		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LAJUT	BULAN INI	S/D BULAN INI							
gns / kng / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.02.2.02.0011	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman	879.755.000	APRO (DAU/PAC/Lainnya)	879.755.000	100,00	100,00	879.889.872	4.250.000	879.813.872	99,91	100,00	0,09	0,00			
1.03.02.2.02.0016	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.2.02.0012	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Air Irigasi	482.902.000	APRO (DAU/PAC/Lainnya)	482.902.000	100,00	100,00	443.079.700	38.150.000	481.271.700	99,66	100,00	0,34	0,00			
1.03.02.2.02.0019	Pemrosesan Sampah Terasa dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kumbukal Irigasi dan Rawa	563.135.000	APRO (DAU/PAC/Lainnya)	563.135.000	100,00	100,00	176.212.400	339.005.500	555.277.900	98,80	100,00	1,40	0,00			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.116.630.000		4.116.630.000	100,00	100,00	793.539.217	3.308.357.890	3.961.797.167	96,34	100,00	3,76	0,00			
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.116.630.000		4.116.630.000	100,00	100,00	793.539.217	3.308.357.890	3.961.797.167	96,34	100,00	3,76	0,00			
1.03.03.2.01.0004	Pemrosesan dan Pemeliharaan Pasokan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30.977.000	APRO (DAU/PAC/Lainnya)	30.977.000	100,00	100,00	22.309.600	5.940.000	28.295.600	91,34	100,00	8,66	0,00	Efisiensi anggaran maksimal Rp. 2.000.000		
1.03.03.2.01.0005	Pemrosesan Sampah, Limbah, dan/atau Limbah Cair dari Terasa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.03.2.01.0006	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perumahan	100.000.000	APRO (DAU/PAC/Lainnya)	100.000.000	100,00	100,00	96.126.000		96.126.000	96,11	100,00	3,87	0,00			
1.03.03.2.01.0008	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perumahan	3.985.653.000	APRO (DAU/PAC/Lainnya)	3.985.653.000	100,00	100,00	635.057.617	3.302.317.950	3.817.375.047	96,28	100,00	3,72	0,00			
1.03.03.2.01.0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	6.891.812.400		6.891.812.400	100,00	100,00	3.419.759.833	4.175.219.817	6.894.879.850	95,69	100,00	4,31	0,00			
Jumlah		213.364.876.583		213.364.876.583	100,00	100,00	108.434.032.835	103.834.117.853	213.068.139.477	96,47	99,68	3,33	0,32			

KODE	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN					REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ				REVISI SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)						(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															
1.03.06.2.01	Pengaliran dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.891.815.400		6.891.815.400	100,00	100,00	2.419.759.533	4.179.219.317	6.994.979.050	95,68	100,00	4,31	0,00			
1.03.06.2.01.0012	Pemangrutan Sistem Drainase Lingkungan			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	6.814.996.400	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	6.814.996.400	100,00	100,00	2.301.928.333	4.318.691.317	6.323.615.650	95,60	100,00	4,40	0,00			
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.06.2.01.0023	Revisi Rencana, Kebijakan, Strategi dan Taktis Sistem Drainase Lingkungan	276.819.000	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	276.819.000	100,00	100,00	115.835.200	159.528.200	271.363.400	98,03	100,00	1,97	0,00			
1.03.06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.063.818.883		13.063.818.883	100,00	100,00	2.486.610.320	10.254.024.036	12.740.634.316	97,53	100,00	2,47	0,00			
1.03.06.2.01	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemeliharaan Lain Pemeliharaan Bangunan (TMS) dan Sertifikat Laki Fungsi Bangunan Gedung	13.063.818.883		13.063.818.883	100,00	100,00	2.486.610.320	10.254.024.036	12.740.634.316	97,53	100,00	2,47	0,00			
1.03.06.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kapasitas Strategis Daerah Kabupaten/Kota	452.258.100	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	452.258.100	100,00	100,00	443.967.866	1.360.000	445.327.866	98,47	100,00	1,53	0,00			
1.03.06.2.01.0020	Sertifikat Tanah Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara untuk Kapasitas Strategis Kabupaten/Kota	101.857.300	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	101.857.300	100,00	100,00	24.186.220	40.255.000	64.441.220	63,27	100,00	36,73	0,00	Sisa Tender dan Efisiensi		
1.03.06.2.01.0021	Pemeliharaan, Perawatan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kapasitas Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.352.553.000	APRO (DAL/PAD/Lainnya)	12.352.553.000	100,00	100,00	1.912.167.894	10.176.443.636	12.088.611.532	97,86	100,00	2,14	0,00			
Jumlah		219.364.876.883		219.364.876.883	100,00	100,00	108.434.032.525	103.634.117.952	212.088.159.477	98,47	99,88	2,33	0,33			

KODE	NAMA KESEKUTAN	Jumlah ANGGARAN	SUDUT DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	FISI					KESIMPULAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)					
pro / ang / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.06.2.01.0012	Pembiayaan dan Pengembangan Pembangunan Gedung	37.475.883	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	37.475.883	100,00	100,00	35.888.000	495.198	36.383.198	97,03	100,00	2,97	0,00		
1.03.06.2.01.0023	Pembiayaan Pemeliharaan Perbaikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Keselamatan Bangunan Gedung (SKBG), Rencana Teknik Pemertahanan Bangunan Gedung (RTK), Tim Proteksi Air (TPA), Tim Pemeliharaan (TPM), Pemeliharaan Bangunan Gedung melalui SIMBG	113.474.800	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	113.474.800	100,00	100,00	70.422.300	35.470.200	105.892.500	88,63	100,00	11,37	0,00	Sisa Tender dan (Batas)	
1.03.06	PROGRAM PERATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.863.263.900		1.863.263.900	100,00	100,00	538.213.222	850.082.100	1.388.295.322	83,47	100,00	16,53	0,00		
1.03.06.2.01	Pembiayaan Perataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.863.263.900		1.863.263.900	100,00	100,00	538.213.222	850.082.100	1.388.295.322	83,47	100,00	16,53	0,00		
1.03.06.2.01.0007	Pembiayaan Perataan Bangunan dan Lingkungan	1.202.362.900	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.202.362.900	100,00	100,00	108.838.700	778.463.300	879.302.000	78,12	100,00	21,88	0,00	Sisa Tender Rp. 253.960.900	
1.03.06.2.01.0010	Pembiayaan Rencana dan Teknik Perataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	460.901.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	460.901.000	100,00	100,00	377.374.522	71.618.800	448.993.322	97,42	100,00	2,58	0,00		
1.03.10	PROGRAM PENYELANGKARAN JALAN	168.498.851.000		168.498.851.000	100,00	100,00	81.381.740.181	82.192.185.843	163.553.905.824	97,07	99,58	2,93	0,42		
1.03.10.2.01	Pembiayaan Jalan Kabupaten/Kota	168.498.851.000		168.498.851.000	100,00	100,00	81.381.740.181	82.192.185.843	163.553.905.824	97,07	99,58	2,93	0,42		
1.03.10.2.01.0029	Pembiayaan Rencana, Kajian, Strategi dan Teknik Penyelenggaraan Jaringan Jalan serta Pemeliharaan Jalan dan Fasilitas	1.328.051.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.328.051.000	100,00	100,00	441.798.100	1.073.936.000	1.515.734.100	98,48	100,00	1,52	0,00		
1.03.10.2.01.0014	Pembiayaan Jalan	785.079.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	785.079.000	100,00	100,00	68.109.200	17.573.000	85.682.200	10,91	10,91	89,09	89,09	Belanja modal tanah Rp. 665 juta (didalamnya ada pembayaran penggantian bangunan)	
Jumlah		218.394.876.583		218.394.876.583	100,00	100,00	188.434.822.525	103.634.117.952	212.068.940.477	96,67	99,68	3,33	8,33		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN DIT			REALISASI KENDARAAN				REALISASI PERSEN S/D BULAN DIT	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KENDARAAN		PERSEN	SPJ					KEM SPT	PERSEN	PERMASALAHAN	UPAYA/REKRESI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN DIT	S/D BULAN DIT	(Rp)					
gns / Ang / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														1.17.130.510) tidak terakumulasi karena belum terselesaikan. Untuk rekomendasi. Untuk memerikakan tanah sebelum dan setelah kemungkinan proyek jaring	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	113.341.000.000	APBD (DAU/Bantuan/ASPD (DAU/PAD/Lainnya)	113.341.000.000	100,00	100,00	48.703.298.512	48.572.048.534	110.303.345.146	97,37	100,00	2,63	0,00		
1.03.10.2.01.0036	Pemeliharaan dan Perbaikan Perbaikan Jalan Keresidangan Keresidangan/Kuda dan Dera	622.001.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	622.001.000	100,00	100,00	488.339.391	130.187.739	816.527.130	99,12	100,00	0,88	0,00		
1.03.10.2.01.0037	Pemeliharaan Jalan Perantara	28.000.000.000	BAN/PRON	28.000.000.000	100,00	100,00	11.721.368.542	15.854.716.170	27.374.879.712	97,77	100,00	2,23	0,00		
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Jalan Perantara	199.878.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	199.878.000	100,00	100,00	198.746.000		196.746.000	98,43	100,00	1,57	0,00		
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	2.210.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), DIF (Data Transfer Pabrik)	2.210.000.000	100,00	100,00	2.133.330.500		2.133.330.500	97,50	100,00	2,50	0,00		
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	2.750.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), DIF (Data Transfer Pabrik)	2.750.000.000	100,00	100,00	1.307.386.300	1.323.283.000	2.680.571.500	97,84	100,00	2,16	0,00		
1.03.10.2.01.0043	Sewa Kendaraan Jalan/Jembatan	549.497.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	549.497.000	100,00	100,00	4.014.000	521.211.000	525.225.000	95,58	100,00	4,42	0,00		
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Jalan Jalan	18.301.124.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya), DIF (Data Transfer Pabrik)	18.301.124.000	100,00	100,00	14.330.188.336	2.899.216.200	17.629.404.536	97,42	100,00	2,58	0,00		
1.03.10.2.01.0048	Pemeliharaan Jembatan	200.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	200.000.000	100,00	100,00	137.260.000		187.260.000	98,63	100,00	1,57	0,00		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	83.844.000		83.844.000	100,00	100,00	91.298.778		91.298.778	98,12	100,00	1,88	0,00		
1.03.11.2.01	Pengembangan Fasilitas Tenaga Terampil Konstruksi	43.830.000		43.830.000	100,00	100,00	43.312.300		43.312.300	98,82	100,00	1,18	0,00		
1.03.11.2.01.001	Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Konstruksi	17.010.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.010.000	100,00	100,00	16.671.300		16.671.300	98,01	100,00	1,99	0,00		
1.03.11.2.01.0018	Pemeliharaan Fasilitas Konstruksi Fasilitas Konstruksi, Teknik dan Alat	26.820.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	26.820.000	100,00	100,00	26.641.000		26.641.000	99,33	100,00	0,67	0,00		
Jumlah		215.846.978.000		215.846.978.000	100,00	100,00	108.434.032.525	103.634.117.952	212.068.108.477	96,67	99,68	2,33	0,22		

KODE	NAMA KEJATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN 2015			REALISASI KEJADIAN				REALISASI FISIK S/D BULAN 2015	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEJADIAN		FISIK	SPJ			KTD SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UMPA/UMLOK	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN 14/11	BULAN 101		S/D BULAN 101				(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.11.3.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	48.214.000		48.214.000	100,00	100,00	47.886.478		47.886.478	97,31	100,00	2,49	0,00		
1.03.11.3.03.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	48.214.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	47.886.478	100,00	100,00	47.886.478		47.886.478	97,31	100,00	2,49	0,00		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	846.392.000		846.392.000	100,00	100,00	341.313.309	347.823.000	388.647.198	88,33	100,00	11,47	0,00		
1.03.12.3.01	Pemetaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RSTR) Kabupaten/Kota	198.229.000		198.229.000	100,00	100,00	98.409.953	98.720.862	198.146.815	99,45	100,00	8,55	0,00		
1.03.12.3.01.0005	Pelaksanaan Penetapan Subdansi RTRW Kabupaten/Kota			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.12.3.01.0006	Pelaksanaan Penetapan Subdansi RSTR Kabupaten/Kota	198.229.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	198.229.000	100,00	100,00	98.409.953	98.720.862	198.146.815	99,45	100,00	8,55	0,00		
1.03.12.3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	308.992.000		308.992.000	100,00	100,00	51.188.228	343.532.338	289.712.566	79,38	100,00	20,62	0,00		
1.03.12.3.01.0005	Pemetaan RSTR Kabupaten/Kota	252.942.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	252.942.000	100,00	100,00	23.964.128	229.940.638	273.904.766	78,25	100,00	21,75	0,00	Terdapat sisa tender sebesar 75.000.000 pada Pemetaan Rencana Jasa Konsultansi Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	
1.03.12.3.01.0006	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	18.950.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.950.000	100,00	100,00	17.215.100	2.391.700	18.807.800	99,29	100,00	0,71	0,00		
1.03.12.3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77.238.000		77.238.000	100,00	100,00	73.294.225	4.390.705	77.684.925	99,80	100,00	0,20	0,00		
1.03.12.3.01.0005	Pemetaan Sinkronisasi Program Perencanaan Ruang	41.153.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	41.153.000	100,00	100,00	38.817.228	2.362.000	41.079.228	99,82	100,00	0,18	0,00		
1.03.12.3.01.0007	Sistem Informasi dan Komunikasi penataan ruang	36.086.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	36.086.000	100,00	100,00	34.478.967	2.128.700	36.605.667	99,78	100,00	0,22	0,00		
1.03.12.3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi	18.322.000		18.322.000	100,00	100,00	18.228.892	880.000	19.108.892	99,80	100,00	1,20	0,00		
Jumlah		219.364.978.583		219.364.978.583	100,00	100,00	188.434.072.925	183.634.117.952	212.868.158.477	94,67	99,48	2,33	0,32		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEGIATAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEViasi		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	RPJ			RIS/DPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI						S/D BULAN INI
gk / mng / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengendalian Pemertanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
1.03.12.2.04.0004	Kordinasi Pelaksanaan Peraturan Ruang	15.322.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	15.322.000	100,00	100,00	15.228.800	880.000	15.108.800	98,59	100,00	1,10	0,00		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.830.000		20.830.000	100,00	100,00	14.580.800	6.101.400	20.682.200	99,29	100,00	0,71	0,00		
2.10.04.2.01	Pemyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000		20.830.000	100,00	100,00	14.580.800	6.101.400	20.682.200	99,29	100,00	0,71	0,00		
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Pemertanfaatan Ruang Perumahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.830.000	100,00	100,00	14.580.800	6.101.400	20.682.200	99,29	100,00	0,71	0,00		
Jumlah		219.254.979.583		219.254.979.583	100,00	100,00	188.434.832.525	103.634.117.952	212.868.150.477	96,67	99,68	3,33	6,32		

Kabupaten, 7 Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


JONI HENGAWINA, ST, MT
NIP. 197007281990031006